



LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT
BADAN LITBANG PERHUBUNGAN**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2021**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan perwujudan penyelenggaraan *clean government* dan *good governance*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun 2021 berisikan program dan kegiatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2021 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun 2021. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran serta uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2022

SEKRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

PANDU YUNianto, ATD., M.Eng, Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan melaksanakan kegiatan pokok seperti yang tertuang pada dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024, yaitu dalam bentuk Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Litbang Perhubungan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor SK 144 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Selanjutnya IKP yang telah tersusun, diturunkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Litbang Perhubungan.

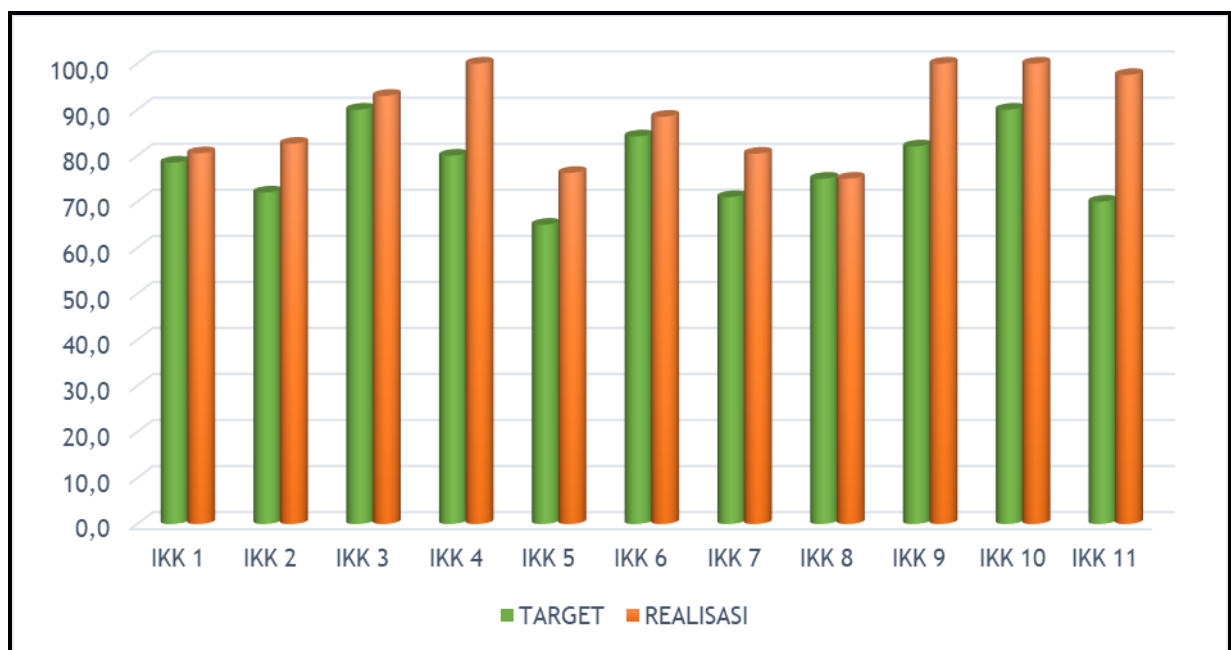
A. Pencapaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 cukup baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 113,78%. Dari sebelas IKK seluruhnya telah melampaui target kinerja yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Setbadan Litbang Perhubungan Tahun 2021. Gambaran kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dari tiap indikator selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. IKK 1 yaitu Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan telah terealisasi sebesar 80,52 melampaui target tahun 2021 sebesar 78,5 sehingga diperoleh capaian kinerja tahun 2021 sebesar 102,57 %;
2. IKK 2 yaitu Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 ditargetkan pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 72 sampai dengan akhir tahun 2021 memperoleh realisasi sebesar 82,60 sehingga capaian kinerja untuk IKK 2 adalah sebesar 114,72%;
3. IKK 3 yaitu Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan ditargetkan pada tahun 2021 memperoleh nilai indeks sebesar 0,93 telah terealisasi di tahun 2021 sebesar 0,93 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,33%;
4. IKK 4 yaitu Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan telah diperoleh nilai indeks sebesar 100 telah melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 80 sehingga capaian kinerja IKK 4 yaitu sebesar 125 %;
5. IKK 5 yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan yang dalam pengukuran capaian indikator ini mengacu pada nilai dari Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) telah terealisasi sebesar 76,25 dengan capaian kinerja sebesar 117,31%;
6. IKK 6 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan ditargetkan pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 84,20 sampai dengan akhir tahun 2021 telah terealisasi sebesar 87,85 sehingga capaian kinerja untuk IKK 6 adalah sebesar 104,33%;

7. IKK 7 yaitu Indeks Penyelenggaraan Perkantoran pada tahun 2021 ditargetkan pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 71 sampai dengan akhir tahun 2021 diperoleh realisasi sebesar 78,92 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 111,15%;
8. IKK 8 yaitu Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Litbang Perhubungan dengan target pada level 3 sampai dengan akhir tahun 2021 diperoleh realisasi pada level 3 sehingga capaian kinerja IKK 8 sebesar 100%;
9. IKK 9 yaitu Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan ditargetkan pada tahun 2021 dapat mencapai sebesar 82% dan telah terealisasi sebesar 100% pada akhir tahun 2021 sehingga capaian kinerja sebesar 121,95%;
10. IKK 10 yaitu Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data telah terealisasi sebesar 100% dengan target di tahun 2021 sebesar 90% sehingga capaian kinerja sebesar 111,11%;
11. IKK 11 yaitu Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi ditargetkan pada tahun 2021 dapat mencapai 70% sampai dengan akhir tahun 2021 telah terealisasi sebesar 97,53% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 139,33%.

Capaian kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



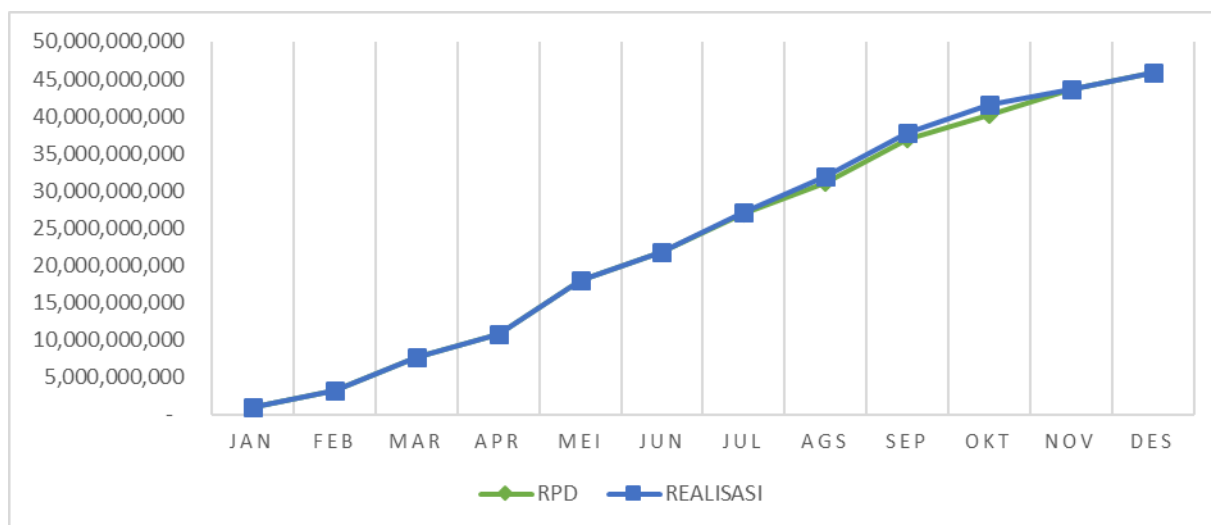
Gambar 1. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021

B. Kinerja Anggaran

Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2021 berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp. 58.184.697.000,-. Pada bulan Februari dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2021 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp. 9.324.987.000,- sehingga anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 48.859.710.000,-. Pada bulan Juli sesuai surat DJA Nomor: S-550/ AG/ AG.3/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 terdapat refocusing anggaran sehingga anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 kembali mengalami revisi yaitu menjadi Rp. 45.843.217.000,-.

Penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 45.831.591.266,- (99,97%), dengan rincian realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 8.947.394.930,- (99,95%), belanja barang sebesar Rp. 30.304.145.545,- (99,98%), belanja modal Rp. 6.580.050.791,- (99,98%).

Secara umum realisasi serapan anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 cukup baik. Sisa belanja barang berasal dari sisa perjalanan dan honor jasa profesi serta sisa belanja pegawai dikarenakan adanya kelebihan perhitungan gaji dan tunjangan kinerja untuk pegawai disebabkan adanya mutasi pegawai dan pensiun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik daya serap Sekretariat Badan Litbang Perhubungan berikut di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Daya Serap Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	1
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA	3
I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	4
I.5 SISTEMATIKA LAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024.....	7
II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2021.....	9
II.3 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
III.1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	16
III.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	16
III.3. REALISASI ANGGARAN	66
BAB IV PENUTUP.....	70
IV.1 KESIMPULAN.....	70
IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT	70
L A M P I R A N	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024.....	8
Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2021.....	11
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK.....	17
Tabel 3. 2 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi	18
Tabel 3. 3 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi.....	20
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Interpretasi Peringkat Komposit.....	21
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kelembagaan Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	23
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 7 Hasil Perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan.....	27
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	28
Tabel 3. 9 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.....	28
Tabel 3. 10 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan.....	29
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perencanaan Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	31
Tabel 3. 12 Tabel Penjelasan Indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	32
Tabel 3. 13 Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	33
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020,.....	34
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	38
Tabel 3. 16 Perhitungan Pengambilan Sampel Responden menggunakan Rumus <i>Slovin</i> dan Realisasi Responden.....	39
Tabel 3. 17 Skor Skala <i>Likert</i>	39
Tabel 3. 18 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran dengan Analisis Skala <i>Likert</i>	40
Tabel 3. 19 Interval Interpretasi Skor.....	41
Tabel 3. 20 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Masing-masing Aspek Penilaian.....	41
Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	42
Tabel 3. 22 Tingkatan Level Maturitas SPIP.....	42
Tabel 3. 23 Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2021.....	43
Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	44
Tabel 3. 25 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan ..	44

Tabel 3. 26 Daftar Mitra Kerja Sama dan Judul Penelitian	45
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan.....	47
Tabel 3. 28 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan.....	48
Tabel 3. 29 Daftar Aplikasi dan Data Balitbanghub Tahun 2021.....	48
Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024	50
Tabel 3. 31 Skor Pembobotan Tingkat Publikasi	51
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	52
Tabel 3. 33 Target dan Realisasi Capaian Rincian <i>Output</i>	53
Tabel 3. 34 Tingkat Penyerapan Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	54
Tabel 3. 35 Perhitungan Skalia Efisiensi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021	55
Tabel 3. 36 Rencana Penarikan Dana Sekretariat Badan Litbang Perhubungan.....	56
Tabel 3. 37 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran per Bulan Tahun 2021	57
Tabel 3. 38 Nilai Variabel Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran	58
Tabel 3. 39 Perkembangan Anggaran Tahun 2015-2021 Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	66
Tabel 3. 40 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2021	68
Tabel 3. 41 Capaian Daya Serap Kegiatan Tahun 2020	69
Tabel 3. 42 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	2
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon III.....	3
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	4
Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	10
Gambar 2. 2 Perjanjian Kerja Awal Tahun 2021	13
Gambar 2. 3 Revisi I Perjanjian Kerja Tahun 2021	14
Gambar 2. 4 Revisi II Perjanjian Kerja Tahun 2021	15
Gambar 3. 1 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Litbang Perhubungan	25
Gambar 3. 2 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	30
Gambar 3. 3 Nilai Kinerja Anggaran dan IKPA Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021	37
Gambar 3. 4 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan pada	52
Gambar 3. 6 <i>Keynote Speech</i> Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati	59
Gambar 3. 5 Sambutan sekaligus <i>Keynote Speech</i> Menteri Perhubungan.....	59
Gambar 3. 7 Pembicara Deputy Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ibu Nawal Nely	59
Gambar 3. 8 Sambutan Pembukaan Seminar oleh Plt. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Setbadan Litbang Perhubungan.....	61
Gambar 3. 9 Pemaparan Materi oleh Narasumber Bapak Sandra Erawanto, S.TP., M.Pub.Pol.	61
Gambar 3. 10 Foto Bersama Narasumber dan Peserta Seminar Etika dan Profesionalisme Kerja – Selasa, 8 Juni 2021	61
Gambar 3. 11 Desain Konten <i>Visual Grafis</i> oleh Mohammad Rahadian Halim Perwakilan Peserta Sekretariat Badan Litbang Perhubungan.....	62
Gambar 3. 12 Pengumuman Pemenang dalam Kegiatan Peluncuran Mitraweb Kementerian Perhubungan dan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2021 – Senin, 28 Juni 2021	62
Gambar 3. 13 <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan tema Meneropong Undang-Undang Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Saat Ini	63
Gambar 3. 14 Piagam Penghargaan Nilai IKPA Terbaik Peringkat Kedua	65
Gambar 3. 15 Sertifikat Akreditasi “A” Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan	65
Gambar 3. 16 Daftar Peringkat 25 Besar Unit Kerja Terbaik dalam Partisipasi Aktif Pengisian Data Kinerja melalui Aplikasi <i>e-performance</i>	66
Gambar 3. 17 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2015 – 2021	67
Gambar 3. 18 Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2015-2021.....	67
Gambar 3. 19 Kurva S - Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Setbadan Litbang	68

LAMPIRAN

Lampiran 1	72
Lampiran 2	74

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean government and good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan wajib untuk disiapkan, disusun, disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengacu pada Permen PAN-RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021 Sekretariat Badan Litbang Perhubungan telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perhubungan. Karenanya maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Eselon II Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 kepada Kepala Badan Perhubungan selaku Pemberi Mandat atas pencapaian kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan manajemen teknisnya dalam penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan perhubungan;
- c. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

I.2.1 Tugas

Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dipimpin oleh Sekretaris Badan, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Litbang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,

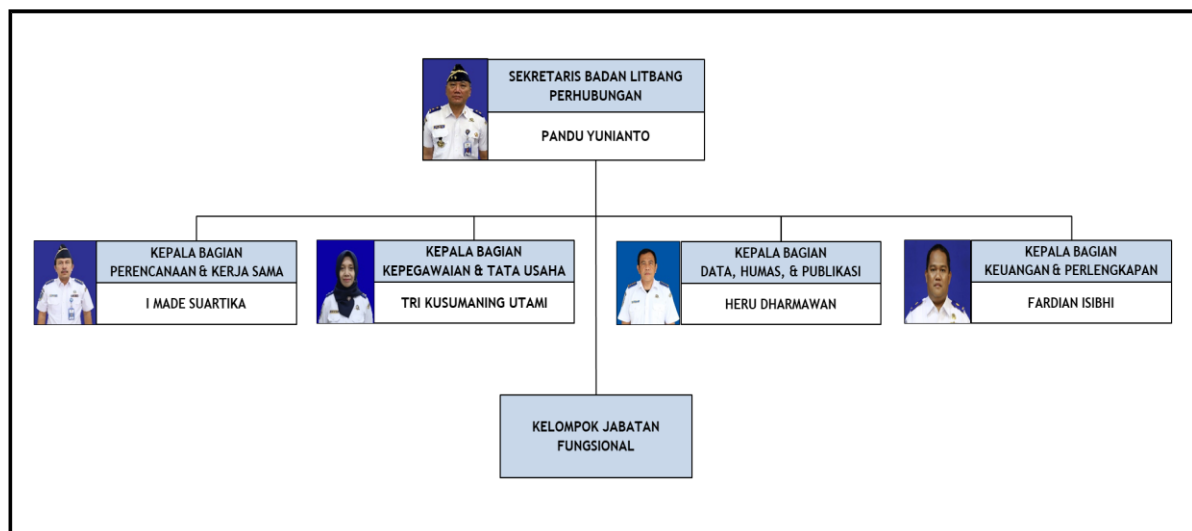
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Litbang Perhubungan.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran serta administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan dan transportasi udara;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan serta organisasi dan tata laksana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- Pengelolaan data, hubungan masyarakat, hukum, serta publikasi hasil-hasil penelitian;
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan serta kerumahtanggaan;

Organisasi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan melingkupi 4 (empat) unit kerja Eselon III yang terdiri dari (1) Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; (2) Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha; (3) Bagian Data, Hubungan Masyarakat, dan Publikasi; dan (4) Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Apabila digambarkan maka struktur organisasi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan berdasarkan PM 67 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

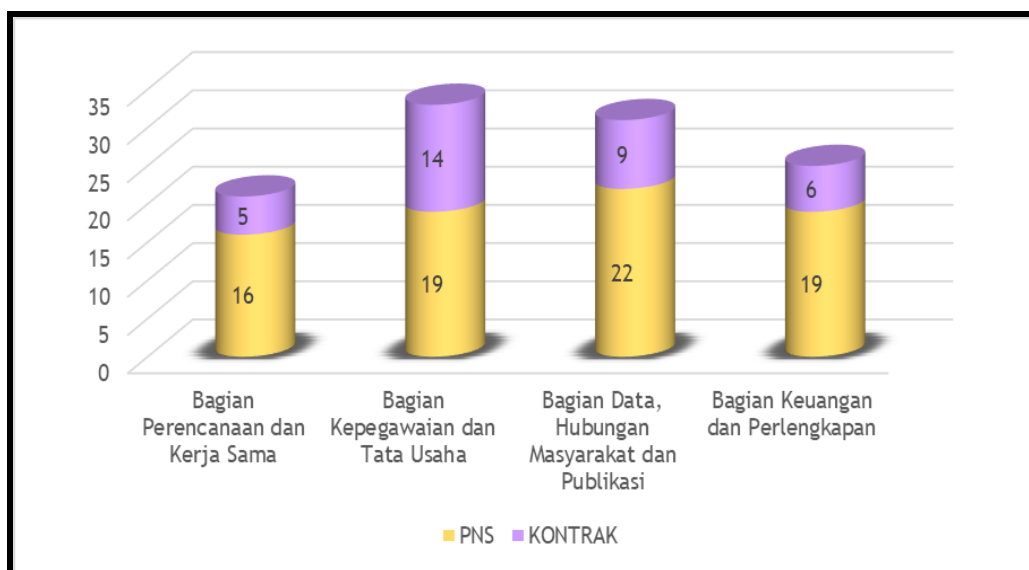
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Badan Litbang Perhubungan merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Komposisi pegawai PNS Sekretariat Badan Litbang Perhubungan berdasarkan unit kerja eselon III, tingkat pendidikan serta golongan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Unit Kerja Eselon III

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Litbang Perhubungan mengalami penurunan semenjak tahun 2015, yaitu dari yang semula berjumlah 83 pegawai di tahun 2015 berkurang menjadi 52 pegawai di tahun 2020. Berkurangnya jumlah pegawai Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dalam kurun waktu tersebut dikarenakan mutasi pegawai, pensiun, dan juga meninggal dunia. Pada tahun 2021 ini jumlah pegawai Sekretariat Badan Litbang Perhubungan menjadi 76 pegawai.

Pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2021 dibantu tenaga kontrak sebanyak 34 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan unit kerja ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.

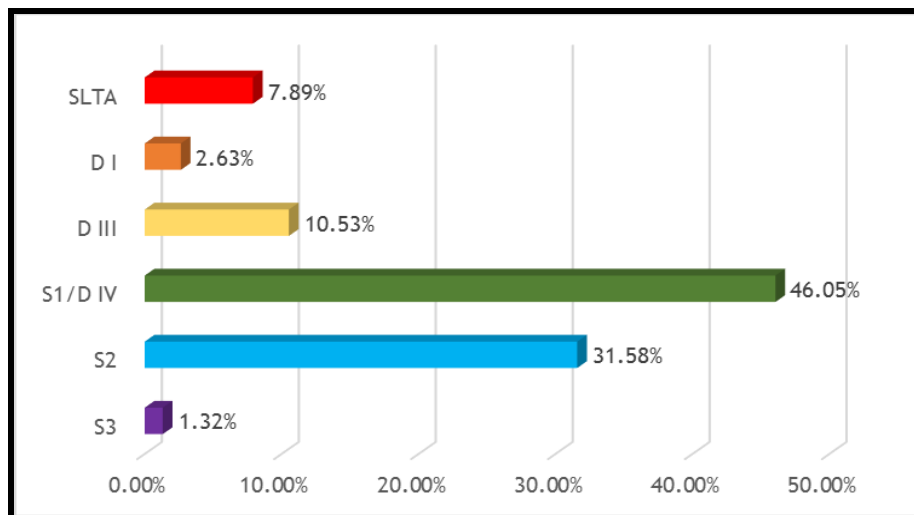


Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Desember 2021

Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon III

2. Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Litbang Perhubungan menurut tingkat pendidikan, yaitu S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 24 orang, S1/DIV sebanyak 35 orang, DIII sebanyak 8 orang, DI sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 6 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.

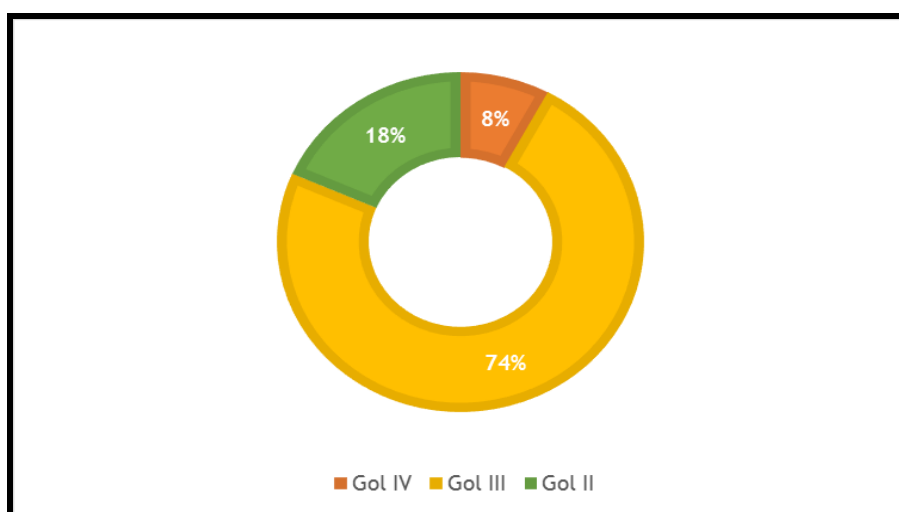


Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Desember 2021

Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

3. Berdasarkan Golongan

Sedangkan berdasarkan golongan tercatat pegawai Sekretariat Badan Litbang Perhubungan didominasi Golongan III sebanyak 56 pegawai atau 73,68%, Golongan IV sebanyak 6 pegawai atau 7,89% dan Golongan II sebanyak 14 pegawai atau 18,42%. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada Gambar 1.4. berikut.



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Desember 2021

Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Tugas utama Badan Litbang Perhubungan adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini hasil penelitian sebagai bahan masukan penyempurnaan kebijakan transportasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

Berangkat dari Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Badan Litbang Perhubungan selanjutnya ditetapkan peran dan fokus kegiatan Badan Litbang Perhubungan ke depan untuk kurun waktu 2020-2024. Adapun peran Badan Litbang Perhubungan ke depannya diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi dan tugas Badan Litbang Perhubungan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan transportasi. Sedangkan fokus kegiatan Badan Litbang Perhubungan meliputi penjabaran peran Badan Litbang Perhubungan terkait dengan fungsi pelayanan Badan Litbang Perhubungan. Peran Badan Litbang Perhubungan untuk kurun lima tahun kedepan diharapkan dapat dioptimalkan dan diarahkan sebagai:

1. Lembaga yang memberikan rekomendasi rancangan kebijakan dan rekomendasi pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi;
2. Lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi;
3. Lembaga yang melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang transportasi ;
4. Lembaga yang menyediakan data hasil kajian kebijakan dan pengembangan teknologi di bidang transportasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi dan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sementara itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan lebih bersifat internal dan bersifat dukungan manajemen, yaitu meliputi kegiatan pokok pelaksanaan perencanaan dan kerja sama, pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha, pelayanan data, hubungan masyarakat, publikasi, dan pelaksanaan urusan keuangan serta perlengkapan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan sebagian besar kegiatan di Sekretariat Badan Litbang Perhubungan merupakan capaian dari kegiatan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan dan pengembangan perhubungan.

Dalam hal ini, peran strategis Sekretariat Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai koordinator pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, yaitu meliputi kegiatan penunjang serta pembinaan. Kegiatan pembinaan khususnya sumber daya manusia litbang meliputi tenaga fungsional tertentu serta kegiatan penunjang yang terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian.

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dengan penekanan kepada potensi, sumber daya manusia, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

BAB II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan/ ikhtisar rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021, yaitu terdiri dari:

a. Analisis Capaian Kinerja

Menguraikan secara sistematis pencapaian kinerja pada tahun 2021, pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rentang waktu beberapa tahun, perbandingan antara realisasi dan target dalam dokumen renstra, analisis keberhasilan/ kegagalan dan hambatan/ kendala capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

Menguraikan pemanfaatan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi beserta analisis anggaran tidak terserap.

BAB IV – Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah unit kerja Eselon II Sekretariat Badan Litbang untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan arah kebijakan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dan sebagai bagian dari Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan mengacu kepada visi dan misi serta tujuan dari Badan Litbang Perhubungan yang disusun berdasarkan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Berikut ini Visi dan Misi Badan Litbang Perhubungan dalam dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan:

VISI

“Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

MISI

Sebagai penjabaran visi tersebut maka misi Badan Litbang Perhubungan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang kemanfaatannya memiliki nilai yang strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi dengan para pihak terkait sebagai mitra kerja strategis;
3. Membangun sistem manajemen penelitian di bidang transportasi melalui peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan efisien;
4. Penguatan sarana, prasarana, SDM, pendanaan, database penelitian dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran yang suportif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal.

TUJUAN

1. Terwujudnya dukungan Badan Litbang Perhubungan dalam pemberian rekomendasi kebijakan strategis perhubungan.
2. Terwujudnya dukungan tata kelola Badan Litbang Perhubungan untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Litbang Perhubungan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu, untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran kegiatannya, setiap sasaran yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan;
2. Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel;
3. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan;
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan.

Secara rinci penjabaran indikator kinerja berikut targetnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78	78,5	79	79,5	80
IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	71	72	73	74	75
IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,8	0,9	0,92	0,96	1
IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78	80	82	84	85
IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	60	65	70	75	80
IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80,2	84,2	86,2	88,2	90,2
IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	70	71	72	73	74
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	80	82	85	86	87
IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90	90	92	92	93
IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70	70	70	75	75

Selanjutnya target kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan awal sebagai dasar penentuan target untuk penyusunan perjanjian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu. Penyusunan target perjanjian kinerja dalam hal ini mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun tersebut.

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana kinerja ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengeralahan sumber daya, terutama anggaran.

Pada tahun 2021, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 58.184.697.000,- dari total pagu alokasi anggaran Badan Litbang Perhubungan Rp. 197.993.171.000,-. Pada bulan Februari dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2021 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp. 9.324.987.000,- sehingga anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 48.859.710.000,-. Pada bulan Juli sesuai surat DJA Nomor: S-550/ AG/ AG.3/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 terdapat refocusing anggaran sehingga anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 kembali mengalami revisi yaitu menjadi Rp. 45.843.217.000,- dari total pagu alokasi anggaran Badan Litbang Perhubungan Rp. 140.998.851.000,-. Dalam hal ini, dokumen RKT Sekretariat Badan Litbang Perhubungan 2021 sebagaimana disajikan pada **Lampiran III** menjadi dasar penentuan alokasi anggaran tahun 2021.

**Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan**

					
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TAHUN 2021					
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SEKRETARIAT BADAN LITBANG		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78,5
		IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	72
		IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,9
2	Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	65
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	84,2
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	71
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	82
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90
		IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70

Jakarta, Desember 2020

SEKRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN


PANDU YUNianto
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19650606 198803 1 001

Pada tahun 2021 diterapkan *Redesain* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dengan penerapan RSPP ini mengubah rincian output Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja layanan dukungan teknis dan administratif, direncanakan sebanyak 12 rincian output yang dikelompokkan dalam 5 kegiatan. Secara rinci alokasi pagu anggaran tahun 2021 untuk Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2021
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan**

KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1. Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1. Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara	693.082.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan	2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2. Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan	195.591.000
		3. Layanan administrasi dan pengembangan SDM	3.264.680.000
	3. Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4. Kebijakan Tata Kelola Internal	1.498.385.000
3. Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan	4. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	5. Layanan Administrasi Rencana, Program dan Evaluasi Riset Kebijakan	1.736.595.000
		6. Layanan Administrasi, Keuangan, Barang Milik Negara, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan Riset Kebijakan	7.847.370.000
	5. Layanan Perkantoran	7. Administrasi Perkantoran Kesekretariatan	21.414.424.000
	6. Layanan Sarana Internal	8. Administrasi Sarana Internal	6.385.826.000
4. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan	7. Kerja Sama	9. Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu-Isu Strategis	549.096.000
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan	8. Layanan Data dan Informasi	10. Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	225.051.000
		11. Layanan Publikasi, Kepustakaan dan Kehumasan	2.033.117.000
TOTAL			45.843.217.000

II.3 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja yang berisikan target kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan yang akan dicapai pada tahun 2021. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak kerja antara Sekretaris Badan Litbang Perhubungan dan Kepala Badan Litbang Perhubungan.

Pada tahun 2021, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan menyusun sebanyak 3 (tiga) dokumen Perjanjian Kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja awal yang disusun pada bulan Januari 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.184.697.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.;
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja revisi I yang disusun pada bulan Maret 2021 dikarenakan adanya pergantian/mutasi pejabat Eselon I di lingkungan Badan Litbang Perhubungan serta adanya *refocusing* anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.859.710.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. ;
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja revisi II yang disusun pada bulan Desember 2021 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.843.217.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.3., Perjanjian Kinerja Revisi II inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB tahun 2020 ini.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Gambar 2. 2 Perjanjian Kerja Awal Tahun 2021
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN				
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SEKRETARIAT BADAN LITBANG	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 1 Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78,5
		IKK 2 Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	72
		IKK 3 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,9
2	Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 4 Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80
		IKK 5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	65
		IKK 6 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	84,2
		IKK 7 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	71
		IKK 8 Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 9 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	82
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 10 Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90
		IKK 11 Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp,-)
1. Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	693.082.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan	9.626.865.000
3. Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan	40.240.103.000
4. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan	2.485.530.000
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan	5.139.117.000

Disetujui,	Jakarta,	Januari 2021
Kepala	Sekretaris	
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
		
UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI	PANDU YUNIANTO	

**Gambar 2. 3 Revisi I Perjanjian Kerja Tahun 2021
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78,5
		IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	72
		IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,9
2	Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	65
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	84,2
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	71
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	82
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90
		IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Rp 693.082.000,00
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan	Rp 7.543.284.000,00
3. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Riset Kebijakan	Rp 35.616.378.000,00
4. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan	Rp 1.621.749.000,00
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan	Rp 3.385.217.000,00

Disetujui,	Jakarta, Maret 2021
Kepala	Sekretaris
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
	
<u>Dr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H.</u>	<u>PANDU YUNianto, ATD., M.Eng. Sc.</u>
Pembina Utama (IV/e)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001	NIP. 19650606 198803 1 001

**Gambar 2. 4 Revisi li Perjanjian Kerja Tahun 2021
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78,5
		IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	72
		IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,9
2	Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	65
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	84,2
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	71
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	82
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90
		IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Rp 693.082.000,00
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan	Rp 4.958.656.000,00
3. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Riset Kebijakan	Rp 37.384.215.000,00
4. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan	Rp 549.096.000,00
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan	Rp 2.258.168.000,00

Disetujui,	Jakarta, Desember 2021
Kepala	Sekretaris
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
	
<u>Dr. UMAR ARIS, S.H, M.M., M.H.</u>	<u>PANDU YUNIANTO, ATD., M.Eng. Sc.</u>
Pembina Utama (IV/e)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001	NIP. 19650606 198803 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Tahapan pengukuran kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yaitu *e-performance* dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring capaian kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian realisasi target *output* kegiatan, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan menyusun laporan Rencana Aksi Kinerja Bulanan Laporan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap bulanan. Data isian capaian kinerja perbulan dalam hal ini menjadi dasar pengerjaan laporan Rencana Aksi Kinerja bulanan. Di samping Laporan Rencana Aksi Kinerja, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Evaluasi Program setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara, Kemenkeu melakukan monitoring capaian target dan proses output/kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>. Sedangkan, Bappenas sendiri melalui pemanfaatan aplikasi e-monev penerapan PP 39 Tahun 2006 dengan alamat <http://e-monev.bappenas.go.id/emon3> dalam bentuk monitoring realisasi target anggaran dan output kegiatan.

III.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Capaian kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Revisi II Tahun 2021 Sekretariat Badan Litbang Perhubungan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2021 dengan realisasinya.

Adapun tahapan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Revisi PK Tahun 2021 dan Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target ditahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024

III.2.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024, terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan sebagai upaya pencapaian program Sekretariat Badan Litbang Perhubungan yang dijabarkan menjadi 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan. Secara rata-rata capaian kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 adalah sebesar 113,78% yang dihitung dari capaian seluruh indikator Sekretariat Badan Libang Perhubungan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78,5	80,52	102,57
		IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	72	82,60*	114,72
		IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,9	0,93	103,33
2	Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80	100	125
		IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	65	76,25	117,31
		IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	84,2	88,46	105,06
		IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	71	78,92	111,15
		IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
3	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	82	100	121,95
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90	100	111,11
		IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70	97,53	139,33
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							113,78

Keterangan* : Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri

Secara rinci, analisis realisasi capaian dan target tahun 2021 pada masing-masing sasaran dan indikator disajikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan

Pencapaian sasaran kegiatan pertama diwujudkan melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3. 2 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Badan Litbang Perhubungan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2021	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78,5	80,52	102,57
IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	72	82,60*	114,72
IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,9	0,93	103,33

Keterangan* : Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri

IKK 1 : Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan

Perhitungan indikator kinerja indeks kelembagaan Badan Litbang Perhubungan berdasarkan pada Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Indeks dihitung berdasarkan hasil rata-rata survey pada instansi pemerintah dengan sampel dua tingkatan organisasi yakni tingkatan tertinggi dan tingkatan di bawah tingkatan tertinggi.

Pada tahun 2018 Badan Litbang telah melakukan evaluasi kelembagaan yang dimaksudkan untuk menganalisis apakah struktur organisasi dan proses organisasi telah sesuai dan mendukung kinerja Badan Litbang Perhubungan. Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi kelembagaan, yaitu:

- a. Tersedianya rekomendasi untuk melaksanakan penataan organisasi;
- b. Salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Badan Litbang Perhubungan.

Perkembangan isu strategis terkait kebutuhan penguatan peran dan rencana reformasi fungsi unit penelitian dan pengembangan yang ada di setiap instansi pemerintahan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan. Mengacu pada Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2018, Badan Litbang Perhubungan mengawali pelaksanaan evaluasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Kuesioner yang disampaikan merupakan alat ukur yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan terkait evaluasi kelembagaan. Metode tahapan evaluasi kelembagaan meliputi:

- a. **Persiapan**
Pada tahapan ini adalah dilakukan penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP. 111 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2018;
- b. **Pengumpulan Data Responden**
Responden yang melaksanakan pengisian kuisisioner evaluasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan adalah sebanyak 5 (lima) responden yang merupakan perwakilan dari setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, yaitu:
 - 1) Sekretariat Badan Litbang Perhubungan;
 - 2) Pusat Litbang Transportasi Antarmoda;
 - 3) Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
 - 4) Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - 5) Pusat Litbang Transportasi Udara.
- c. **Pelaksanaan Pengisian Kuisisioner**
Pengisian kuisisioner dilakukan oleh setiap responden berdasarkan kondisi lingkungan organisasi masing-masing. Mekanisme pelaksanaan dapat menggunakan dokumen *hardcopy* maupun *softcopy* melalui fasilitasi pengisian kuisisioner secara *online*.
- d. **Pengolahan Data: Penghitungan Nilai, Bobot dan Konversinya**
Analisis pengolahan data dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai, bobot dan konversinya berdasarkan Pedoman Evaluasi Kelembagaan yang telah ditetapkan dalam PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat sebanyak 66 (enam puluh enam) pertanyaan instrumen yang dikelompokkan dalam dua dimensi dan delapan sub dimensi. Adapun setiap pertanyaan memiliki nilai jawaban yang menggunakan pendekatan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Untuk perhitungan nilai dari jawaban yang dipilih telah ditetapkan bobot untuk masing-masing dimensi sesuai PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai konversinya.

e. Pengkategorian Hasil Perhitungan

Pengkategorian hasil perhitungan evaluasi dilakukan sesuai dengan hasil penilaian dan perhitungan nilai, bobot dan konversinya. Selanjutnya hasil perhitungan akhir disajikan menyeluruh dalam bentuk peringkat komposit (P). Peringkat komposit menyajikan interpretasi terhadap hasil total skor dalam 5 (lima) kategori sebagaimana ditetapkan dalam PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Rentang nilai peringkat komposit berikut interpretasi dari setiap peringkat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81 – 100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61 – 80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41 – 60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21 – 40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0 – 20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.

Berdasarkan hasil analisis perolehan nilai pada masing – masing dimensi untuk setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan maka dilakukan pengkategorian peringkat untuk masing-masing unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Secara rinci tabulasi hasil perhitungan dan interpretasi peringkat setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Interpretasi Peringkat Komposit Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan

NO.	UNIT KERJA	NILAI TOTAL	PERINGKAT KOMPOSIT	INTERPRETASI
1	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	82,145	P-5	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
2	Puslitbang Transportasi Antarmoda	80,099	P-4	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

NO.	UNIT KERJA	NILAI TOTAL	PERINGKAT KOMPOSIT	INTERPRETASI
3	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	80,122	P-4	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.
4	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	80,153	P-4	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.
5	Puslitbang Transportasi Udara	80,081	P-4	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

Dari tabel nilai akhir untuk setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan di atas diperoleh nilai rata-rata Badan Litbang Perhubungan adalah sebesar 80,52. Nilai ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan untuk nilai organisasi Badan Litbang Perhubungan berada pada peringkat komposit P-4 dengan indikasi bahwa organisasi dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif, memiliki kemampuan mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

Berdasarkan Peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 yaitu Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali, maka dapat disimpulkan bahwa hasil nilai rata-rata Evaluasi Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2018 tersebut merupakan angka realisasi terhadap IKK 1 Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan yaitu sebesar 80,52 telah melampaui target yaitu sebesar 78,5 dan diperoleh capaian kinerja pada IKK 1 sebesar 102,57%.

Keberhasilan pencapaian target indikator ini didukung oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

- Selarasnya antara tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan dengan tujuan, visi, misi, strategi dan program Badan Litbang Perhubungan;
- Struktur organisasi Badan Litbang Perhubungan dapat menyesuaikan dan mengakomodir dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka menengah;
- Proses organisasi Badan Litbang Perhubungan telah mencerminkan visi, misi dan strategi Badan Litbang Perhubungan serta telah menyesuaikan dan mengakomodir kebutuhan dinamis internal organisasi baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko dan teknologi informasi.

Rata-rata perolehan nilai terendah dari hasil evaluasi kelembagaan untuk setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan adalah pada sub dimensi kompleksitas. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu mengalami pengurangan yang cukup signifikan sementara pelaksanaan jenis pekerjaan semakin kompleks. Di samping itu, penguatan peran Badan Litbang Perhubungan masih diperlukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian untuk perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi organisasi, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

- Penguatan sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai Badan Litbang Perhubungan;
- Pada tahun 2021 Badan Litbang Perhubungan telah mengangkat beberapa pejabat fungsional tertentu dan juga telah dilakukan pengangkatan CPNS sebanyak 71 pegawai yang sebagian besar mengisi kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu;
- penguatan pelaksanaan pekerjaan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan penyempurnaan mekanisme kerja dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP) secara berkala.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kelembagaan Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78,5	80,52	80,52	80

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2021 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

IKK 2 : Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN telah diatur dalam peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh ASN di lingkungan Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2021. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:

- a. Pegawai ASN, dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN;
- b. Instansi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional ; dan
- c. Masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN ini berdasarkan 4 (empat) dimensi, yang disetiap dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN, yaitu antara lain:

- a. Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Indikator yang digunakan adalah jenjang Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata Tiga), S-2 (Strata Dua), S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat), D-III (Diploma Tiga), D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat, di bawah SLTA.
- b. Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
- c. Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
- d. Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang, dan Hukuman disiplin berat.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

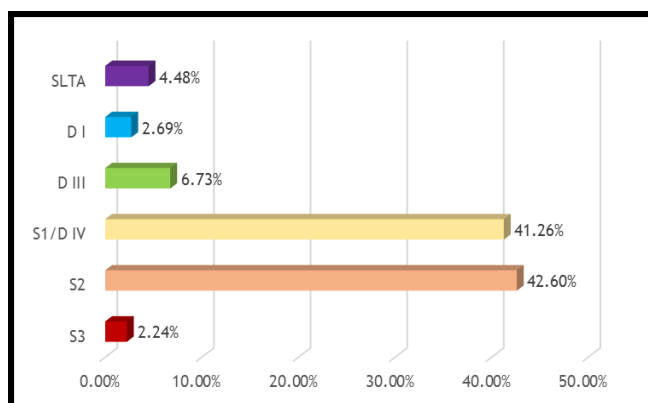
- Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
- Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
- Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
- Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
- Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Pada tahun 2021, Badan Litbang Perhubungan telah melakukan penilaian mandiri untuk Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai Badan Litbang Perhubungan. Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh hasil Indeks Profesionalitas ASN Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 adalah sebesar 82,60 telah melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 72 sehingga diperoleh capaian kinerja IKK 2 sebesar 114,72%.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini tiap tahunnya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, namun sampai dengan akhir tahun 2021 masih belum didapatkan hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Badan Litbang Perhubungan dari BKN, sehingga realisasi maupun capaian kinerja untuk IKK 2 menggunakan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan Badan Litbang Perhubungan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator ini, antara lain:

- Tingkat Pendidikan pegawai Badan Litbang Perhubungan yang sebagian besar telah berada pada jenjang Pendidikan S-2 (Strata Dua) dan S-1 (Strata Satu), yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Gambar 3. 1 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Litbang Perhubungan

- Pegawai Badan Litbang Perhubungan yang setiap tahunnya selalu berpartisipasi aktif atau ikut serta dalam pengembangan kompetensi baik dalam bentuk Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya. Selain itu Badan Litbang Perhubungan juga secara rutin setiap tahun menyelenggarakan berbagai Pendidikan dan Pelatihan untuk diikuti oleh pegawai Badan Litbang Perhubungan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat;
- Kinerja pegawai Badan Litbang Perhubungan yang berdasarkan pada penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) rata-rata berada pada kriteria Sangat Baik dan Baik;

- d. Pada tahun 2021 tidak ada pegawai Badan Litbang Perhubungan yang dikenakan baik Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang, maupun Hukuman disiplin berat.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	72	82,60*	82,23*	75

Keterangan : Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2021 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024, selain itu dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan realisasi di tahun 2021.

IKK 3 : Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standard penilaian penerapan Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan. Penilaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN ini mengadopsi Penilaian Sistem Merit yang berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit pada Manajemen ASN dan Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, penilaian dilakukan oleh KASN terhadap seluruh Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan telah dimulai sejak Februari 2020.

Berdasarkan peraturan tersebut penilaian sistem merit hanya dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga dan tidak ada hasil penilaian di tingkat Unit Kerja Eselon I dari Kementerian/Lembaga sehingga untuk realisasi indikator ini Badan Litbang Perhubungan melakukan penilaian mandiri.

Penilaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dilakukan berdasarkan penerapan 8 (delapan) aspek-aspek dengan menggunakan sistem skor dan bobot. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit. Skor sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan, antara lain:

- Kurang dengan skor 1, jika sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan;
- Cukup dengan skor 2, jika baru sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
- Baik dengan skor 3, jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
- Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas.

Berikut ini tabel hasil perhitungan mandiri Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan:

Tabel 3. 7 Hasil Perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan

NO.	ASPEK	TOTAL BOBOT	BOBOT BALITBANG
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan Pegawai	40	40
2	Pengadaan Pegawai	40	40
3	Pengembangan Karir Pegawai	130	120
4	Promosi dan Mutasi Pegawai	40	40
5	Manajemen Kinerja Pegawai	80	80
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Pegawai	40	40
7	Perlindungan dan Pelayanan Pegawai	16	8
8	Sistem Informasi Pegawai	24	15
JUMLAH		410	383
INDEKS TATA KELOLA MANAJEMEN ASN: Jumlah Bobot Balitbang / Jumlah Total Bobot			0,93

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh realisasi Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan adalah sebesar 0,93 telah melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 0,9 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,33%. Ketercapaian pada indikator ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Badan Litbang Perhubungan secara rutin selalu melakukan pembaharuan data pegawai yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi selain itu Badan Litbang Perhubungan setiap tahun telah melakukan analisis beban kerja sehingga telah tersedia peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai Badan Litbang Perhubungan untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan No. 99 Tahun 2021 tentang kebutuhan PNS di Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2024;
- Setiap tahun Badan Litbang Perhubungan melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, sehingga setiap tahunnya dapat diselenggarakan diklat sesuai kebutuhan pegawai dan dapat mengatasi kesenjangan kompetensi serta kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan dan pengusulan *assessment* untuk jabatan struktural, sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan kebijakan jabatan struktural secara terbuka dan kompetitif;

- d. Telah tersosialisasinya kebijakan internal tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Badan Litbang Perhubungan serta telah terlaksananya pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai Badan Litbang Perhubungan dalam bentuk dokumen Laporan Unit Kepatuhan Internal yang disusun tiap triwulan.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,90	0,93	0,92	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2020 dan masih belum memenuhi target bila dibandingkan dengan target 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis kedua diwujudkan melalui 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2021	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80	100	125
IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	65	76,25	117,31
IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	84,2	87,85	104,33
IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	71	78,92	111,15

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2021	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	100

IKK 4 : Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan

Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan, dengan definisi Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Pengukuran Indeks Perencanaan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) dokumen perencanaan, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian sasaran/target Prioritas Nasional (PN). Manfaat dari indeks perencanaan ini adalah dapat mengetahui tingkat kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaannya.

Indikator Indeks Perencanaan ini merupakan indikator turunan dari indikator Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan yang merupakan indikator dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan diukur melalui 3 (tiga) aspek penilaian yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (40%), dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%). Pengukuran Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan hanya mengukur aspek Integrasi Perencanaan dengan bobot (100%).

Indikator Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan memiliki target pada tahun 2021 yaitu sebesar 80 dan telah terealisasi pada tahun 2021 sebesar 100 sehingga diperoleh capaian kinerja IKK 4 yaitu sebesar 125%. Berikut tabel hasil perhitungan Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021:

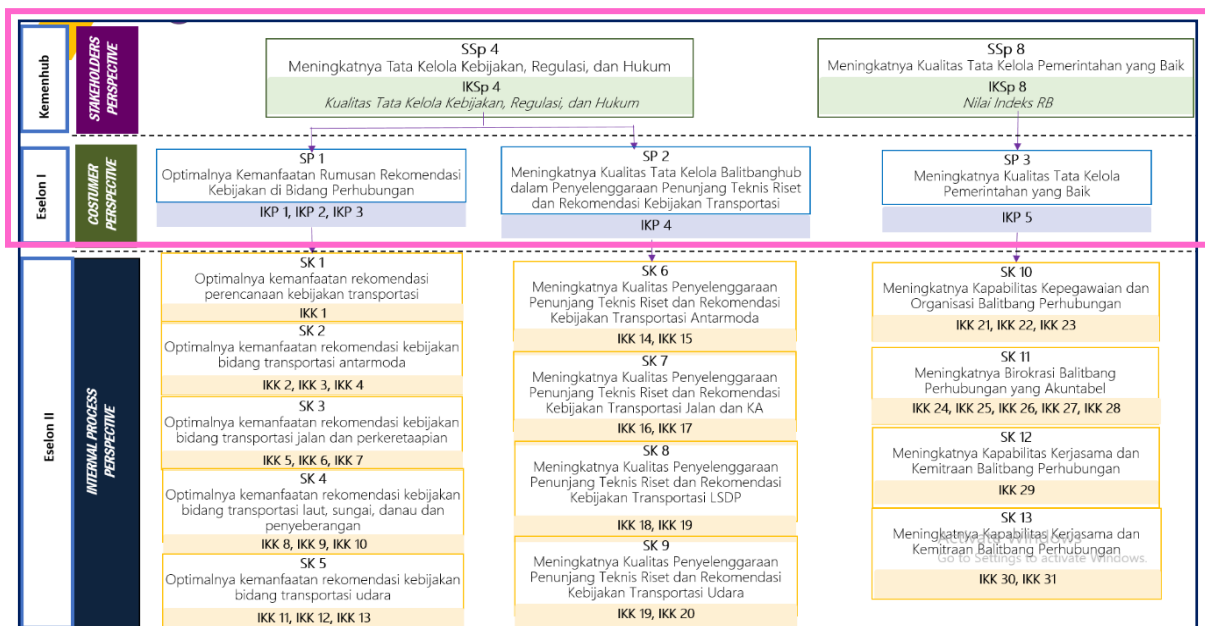
Tabel 3. 10 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan

NO	ASPEK	BOBOT	NILAI BALITBANGHUB
A	Integrasi Perencanaan		
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Badan Litbang Perhubungan dengan sasaran Kementerian Perhubungan *)	20%	20%
2	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Badan Litbang dengan sasaran PN dalam RKP	40%	40%

NO	ASPEK	BOBOT	NILAI BALITBANGHUB
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Badan Litbang dengan sasaran Renstra Badan Litbang **)	40%	40%
Total Integrasi Perencanaan Balitbanghub			100%
Keterangan:			
*) diukur 1 kali dalam 5 tahun			
**) untuk mengukur Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan			

Berdasarkan tabel hasil perhitungan indeks perencanaan Badan Litbang Perhubungan di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian IKK4 ini adalah sebagai berikut:

- Sasaran Program Badan Litbang Perhubungan telah selaras dengan Sasaran Kementerian Perhubungan, hal ini dikarenakan Sasaran Program Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan Sasaran Program Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan juga Sasaran Prioritas Nasional dalam dokumen RKP. Kesesuaian Sasaran Program Badan Litbang Perhubungan dengan Sasaran Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Sumber: Bagian Perencanaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 2 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan

- Dokumen penganggaran Badan Litbang Perhubungan juga telah disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan pemrograman Badan Litbang Perhubungan, sehingga sasaran program Badan Litbang Perhubungan dalam dokumen Renja Badan Litbang Perhubungan telah sesuai dengan sasaran yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024;

- c. Penyusunan dokumen perencanaan, pemrograman, dan penganggaran Badan Litbang Perhubungan selalu memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi serta Badan Litbang Perhubungan selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut sehingga dokumen perencanaan terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- d. Badan Litbang Perhubungan telah melakukan penyesuaian Sasaran Progran dan Indikator Kinerja Program pada aplikasi KRISNA RENJA sehingga indikator pada aplikasi tersebut telah sesuai dengan Sasaran Progran dan Indikator Kinerja Program yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perencanaan Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80	100	100	85

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2021 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

IKK 5 : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu aspek indikator dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaain Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - 1) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - 2) *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - 3) *E-Purchasing*;

- 4) *Non-E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing*;
 - 5) E-Kontrak.
- b. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDMPBJ);
 - c. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setiap satu tahun sekali. Setiap indikator penilaian masing-masing memiliki bobot tersendiri di tiap tahunnya, bobot penilaian tahun 2021 dari tiap indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Tabel Penjelasan Indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

NO.	INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT
A.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan:		
	1. SiRUP	a. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $\geq 50\%$ s.d 100%, diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP; b. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $< 50\%$, diberi nilai 0 (nol).	10%
	2. <i>E-Tendering</i>	a. K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ <i>E-Tendering</i> berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian; b. K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ <i>E-Tendering</i> berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).	20%
	3. <i>E-Purchasing</i>	<i>E-Purchasing</i> Katalog: a. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket $\geq 50\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian; b. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 50\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol). <i>E-Purchasing</i> Toko Daring: a. K/L/Pemda sudah melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus); b. K/L/Pemda belum melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol).	-
	4. <i>Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing</i>	a. K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ <i>Non-E-Tendering</i> dan <i>Non-E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian b. K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ <i>Non-E-Tendering</i> dan <i>Non-E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).	-

NO.	INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT
	5. E-Kontrak	a. K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 20\%$ E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai sesuai persentase capaian. b. K/L/Pemda sudah menerapkan $< 20\%$ E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).	-
B.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah Jabatan Fungsional (JF) PPBJ terhadap formasi JF PPBJ. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP. Jumlah JF PPBJ dihitung berdasarkan jumlah salinan SK pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP.	30%
C.	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator. Perhitungan Nilai untuk masing-masing capaian kematangan UKPBJ sebagai berikut: a. Capaian Kematangan 9/9 Nilai 40,00 b. Capaian Kematangan 8/9 Nilai 35,56 c. Capaian Kematangan 7/9 Nilai 31,11 d. Capaian Kematangan 6/9 Nilai 26,67 e. Capaian Kematangan 5/9 Nilai 22,22 f. Capaian Kematangan 4/9 Nilai 17,78 g. Capaian Kematangan 3/9 Nilai 13,33 h. Capaian Kematangan 2/9 Nilai 8,89 i. Capaian Kematangan 1/9 Nilai 4,44 j. Capaian Kematangan 0/9 Nilai 0,00	40%

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Kementerian Perhubungan oleh LKPP selaku Lembaga Pembina pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan berdasarkan surat Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 29397/Ses.2/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Klarifikasi Hasil Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan, Kementerian Perhubungan memperoleh total nilai sebesar 76,25 masuk kedalam predikat Baik, dengan rincian penilaian tiap indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	NILAI
1	SiRUP	0

NO.	INDIKATOR	NILAI
2	E-Tendering	20
3	E-Purchasing	0
4	Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing	0
5	E-Kontrak	0
6	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	16,25
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	40
TOTAL		76,25
PREDIKAT		BAIK

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

- Istimewa Nilai 100 (seratus).
- Sangat Baik Rentang nilai >90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100 (kurang dari seratus)
- Baik Rentang nilai >70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh)
- Cukup Rentang nilai >50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
- Kurang Nilai <50 (kurang dari lima puluh).

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa hanya dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga Badan Litbang perhubungan mengadopsi nilai dari Kementerian Perhubungan, sehingga realisasi IKK 5 di tahun 2021 adalah sebesar 76,25 bila dibandingkan dengan target sebesar 65 maka diperoleh capaian kinerja IKK 5 tahun 2021 adalah sebesar 117,31%.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	65	76,25	58,8	80

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan masih belum mencapai target bila dibandingkan dengan target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

IKK 6 : Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan

Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan merupakan suatu indikator untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Badan Litbang Perhubungan. Indikator yang diusulkan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, antara lain sebagai berikut :

- a. Kinerja anggaran dengan bobot 60%;
Evaluasi kinerja anggaran merupakan suatu proses untuk melakukan, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga evaluasi kinerja anggaran dilakukan setiap tahunnya untuk memperoleh nilai kinerja anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas:

- 1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Apek Implementasi dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I /program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- 2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat eselon I/program dengan mengukur variabel-variabel capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I/ program.
- 3) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga dan tingkat eselon I / program dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program dihitung berdasarkan rata-rata dari:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I /program; dan
- 2) rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan lingkup kewenangan eselon I/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I /program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon I/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon I/program dengan bobot masing-masing aspek Evaluasi Kinerja Anggaran yaitu Aspek Implementasi dengan bobot sebesar 33,3% dan Aspek Manfaat dengan bobot sebesar 66,7%

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
 - 2) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% s.d. 90% dikategorikan dengan Baik;
 - 3) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% s.d. 80% dikategorikan dengan Cukup;
 - 4) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% s.d. 60% dikategorikan dengan Kurang;
 - 5) Nilai Kinerja Anggaran s.d. 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.
- b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%;
- IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan.
- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran IKPA tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu :
- 1) Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%);
 - 2) Data Kontrak (bobot nilai 10%);
 - 3) Penyelesaian Tagihan (bobot nilai 10%);
 - 4) Capaian Output (bobot nilai 17%);
 - 5) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%);
 - 6) Revisi DIPA (bobot nilai 5%);
 - 7) Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%);
 - 8) LPJ Bendahara (bobot nilai 5%);
 - 9) Perencanaan Kas (bobot nilai 5%);
 - 10) Kesalahan Surat Perintah Membayar (bobot nilai 5%);
 - 11) Retur Surat Perintah Pencairan Dana (bobot nilai 5%);
 - 12) Pagu Minus (bobot nilai 5%);
 - 13) Dispensasi Surat Perintah Membayar (bobot nilai 5%).

Berikut hasil pengukuran nilai kinerja anggaran dan IKPA Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan:



Sumber : Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Gambar 3.3 Nilai Kinerja Anggaran dan IKPA Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021

Berdasarkan aplikasi SMART Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang Perhubungan adalah sebesar 84,35 jika dikalikan dengan bobot 60% maka diperoleh skor untuk nilai kinerja anggaran sebesar 50,62 dan untuk nilai IKPA Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 94,62 jika dikalikan dengan bobot 40% diperoleh hasil akhir skor untuk nilai IKPA sebesar 37,85.

Berdasarkan hasil pengukuran skor dari tiap indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan diperoleh hasil realisasi tahun 2021 adalah sebesar 88,46 telah mencapai bahkan melampaui target pada tahun 2021 yaitu sebesar 84,2 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 104,33%. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 6, antara lain:

- Pada tahun 2021 Badan Litbang Perhubungan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan, sehingga setiap bulan dapat diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran serta dapat segera diberikan solusi penyelesaian kendala dan permasalahan tersebut;
- Partisipasi aktif pimpinan Badan Litbang Perhubungan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan;
- Pada masa pandemi di tahun 2021 Badan Litbang Perhubungan mampu secara cepat beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat pada masa pandemi, sehingga kendala yang terjadi pada saat masa pandemi dapat segera teratasi;
- Pelaksanaan kegiatan daring atau online pada masa pandemi seperti *meeting online*, webinar, dan pengumpulan data penelitian menggunakan aplikasi *e-survey*. Hal tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 pada masa pandemi.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	84,20	88,46	93,71	90,20

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2021 mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang disebabkan oleh nilai capaian output program terhadap indikator Layanan Penunjang Teknis Riset pada aplikasi SMART tidak dapat dilakukan pengisian sehingga capaian menjadi 0 (nol) dan hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan Trilateral Meeting antara Badan Litbang Perhubungan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada aplikasi KRISNA RENJA yang merupakan sumber data dalam aplikasi SMART namun sampai dengan batas akhir pengisian aplikasi SMART penyesuaian indikator tersebut belum dilakukan approval oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga capaian realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

IKK 7 : Indeks Penyelenggaraan Perkantoran

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Badan Litbang Perhubungan. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Badan Litbang Perhubungan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Badan litbang Perhubungan. Sesuai dengan tugas dan fungsi, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelayanan pengguna sarana dan prasarana perkantoran di gedung Kantor Badan Litbang Perhubungan yang meliputi aspek sarana, prasarana, SDM, tanggap darurat dan fasilitas lainnya yang tersedia di lingkungan kantor Badan Litbang Perhubungan. Kualitas pelayanan tersebut dinilai dari tingkat kenyamanan, keamanan, kemudahan dan keterjangkauan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Pengukuran indeks penyelenggaraan perkantoran dihitung dengan melalui survey yang dilakukan dengan pengisian kuesioner yang nantinya nilai kuesioner akan dikonversi ke dalam bentuk persentase (%).

Kuesioner yang digunakan untuk penilaian IKK 7 terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sumber Daya Manusia, dan Aspek Tanggap Darurat dengan jumlah total pertanyaan sebanyak 88 pertanyaan. Teknik pengambilan sampel responden menggunakan Rumus Slovin dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

n = Sampel, N = Populasi, d = nilai presisi 90% atau sig.0,10

Responden dalam pengisian kuesioner ini terdiri dari dua kategori yaitu kategori internal yang merupakan pegawai Badan Litbang Perhubungan dan kategori eksternal yang pengunjung lainnya yang berkunjung ke kantor Badan Litbang Perhubungan yaitu pegawai Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan pengunjung lainnya. Berikut tabel perhitungan pengambilan sampel responden:

Tabel 3. 16 Perhitungan Pengambilan Sampel Responden menggunakan Rumus Slovin dan Realisasi Responden

NO.	RESPONDEN	POPULASI	NILAI PRESISI	TOTAL SAMPEL	REALISASI SAMPEL
1.	Internal	296	10%	75	77
2.	Eksternal	163	10%	62	128
TOTAL				137	205

Analisis hasil survey dilakukan dengan menggunakan analisis Skala Likert yang merupakan salah satu bentuk skala yang digunakan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif. Data tersebut diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, ataupun sikap seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Skor Skala Likert dalam pengukuran IKK 7 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Skor Skala Likert

SKOR	JAWABAN
1	Sangat Tidak Baik
2	Tidak Baik
3	Cukup Baik
4	Baik
5	Sangat Baik

Dari seluruh data yang terkumpul, maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan jenis jawaban yang diperoleh setelah itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rumus = T \times P_n$$

T = Total jumlah responden yang memilih, P_n = Pilihan angka skor Likert

Setelah itu dilakukan pengukuran Skor Interpretasi yang harus terlebih dahulu diketahui skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden} \quad X = \text{Skor Terendah} \times \text{Jumlah Responden}$$

Langkah terakhir, untuk mengetahui kesimpulan dari hasil survey adalah dengan menghitung Skor Interpretasi responden yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100\%$$

Tabel 3. 18 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran dengan Analisis Skala Likert

SKOR	JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	JUMLAH SKOR LIKERT	SKOR TERTINGGI (Y)	SKOR TERENDAH (X)
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) x (3)	(5)	(6)
1	Sangat Tidak Baik	488	488	Y = 5 x 87 x 205	X = 1 x 87 x 205
2	Tidak Baik	794	1588		
3	Cukup Baik	3492	10476		
4	Baik	7479	29916		
5	Sangat Baik	5582	27910		
TOTAL SKOR			70378	89175	17835
$\text{Indeks (\%)} = \frac{70378}{89175} \times 100\%$					78,92%

Setelah dilakukan perhitungan indeks, perlu dilakukan pengukuran interval (rentang jarak) dan interpretasi persentase dengan metode mencari Interval Skor Persen (I) dengan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}}$$

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh hasil Interval Skor Persen yaitu sebesar 20 yang interval jaraknya dari terendah sebesar 0% hingga tertinggi sebesar 100%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$I = \frac{100}{5} = 20$$

Dari pengukuran interpretasi skor di atas, diperoleh hasil berdasarkan interval adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Interval Interpretasi Skor

SKOR	JAWABAN
0% - 19,99%	Sangat Tidak Baik
20% - 39,99%	Tidak Baik
40% - 59,99%	Cukup Baik
60% - 79,99%	Baik
80% - 100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel perhitungan di atas diperoleh realisasi untuk IKK 7 pada tahun 2021 adalah sebesar 78,92 dengan interpretasi skor “Baik”, telah melampaui target ditahun 2021 sebesar 71 sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator indeks penyelenggaraan perkantoran sebesar 111,15%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Komitmen tinggi Badan Litbang Perhubungan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perkantoran dengan tersedianya sarana dan prasarana di kantor Badan Litbang Perhubungan yang memadai dan secara berkala rutin dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya, sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan dengan semestinya. Selain itu Badan Litbang Perhubungan selalu melakukan *update* sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan perubahan teknologi;
- Badan Litbang Perhubungan secara rutin setiap harinya melakukan pengarahan dan evaluasi kinerja kepada SDM pelaksana penyelenggaraan perkantoran, sehingga SDM tersebut dapat memberikan pelayanan yang prima;
- Tersedianya sarana dan prasarana Badan Litbang Perhubungan yang mendukung keselamatan dan keamanan para pengguna.

Badan Litbang Perhubungan akan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penyelenggaraan perkantoran sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan oleh para responden dalam pengisian kuesioner survey indeks penyelenggaraan perkantoran. Secara rinci penilaian indkes penyelenggaraan perkantoran dari tiap aspek penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 20 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Masing-masing Aspek Penilaian

NO.	ASPEK	JUMLAH SKOR LIKERT	SKOR TERTINGGI (Y)	INDEKS (%)	INTERPRETASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)
1	Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran	48146	61500	78,29	Baik
2	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	18958	23575	80,42	Sangat Baik
3	Aspek Keselamatan dan Keamanan Gedung	3274	4100	79,85	Baik
TOTAL SKOR		70378	89175	78,92	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai indeks terendah yaitu pada Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran dan nilai indeks tertinggi yaitu pada Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dengan predikat “Sangat Baik”.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	71	78,92	N/A (belum dilakukan penilaian)	74

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2021 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 dan jika dibandingkan dengan dengan realisasi tahun 2020 masih belum bisa dilakukan karena di tahun 2020 belum dilakukan penilaian untuk indikator indeks penyelenggaraan perkantoran.

IKK 8 : Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Kementerian. Pedoman tingkat maturitas SPIP ditetapkan melalui peraturan kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Tingkatan level maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Tingkatan Level Maturitas SPIP

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN
0	Belum ada (dalam penataan)	$0 < \text{skor} < 1.0$	Belum memiliki kebijakan dan prosedur.
1	Rintisan	$1.0 < \text{Skor} < 2.0$	Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis. Namun masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa komunikasi dan Pemantauan.

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN
2	Berkembang	2.0 < Skor < 3.0	Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
3	Terdefinisi	3.0 < Skor < 4.0	Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan Terukur	4.0 < Skor < 4.5	Ada Praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5	Optimum	4.5 < Skor < 5	Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan. Terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan pedoman penilaian tingkat maturitas SPIP yang telah disahkan dalam Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemenintah Daerah. Berdasarkan pedoman ini penilaian maturitas SPIP dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I maupun Eselon II yang nantinya hasil Penilaian Mandiri (PM) tersebut akan direkapitulasi menjadi nilai akhir maturitas SPIP tingkat Kementerian Perhubungan yang kemudian nilai tersebut akan dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Perubahan penilaian juga terdapat pada objek penilaian, dimana pada penilaian maturitas SPIP sebelumnya hanya penilaian struktur dan proses, sedangkan pada penilaian maturitas SPIP yang baru meliputi aspek perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil. Selain itu, juga terdapat perubahan pada hasil penilaian SPIP terintegrasi yang terdiri dari Nilai Maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan Penjaminan Kualitas maturitas SPIP Tahun 2021 terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2021, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor	
			Hasil PM	Hasil PK
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000	2,000
2.	Struktur dan Proses	2	0,881	0,838
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	1,095	0,855
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,86	3,693

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor	
			Hasil PM	Hasil PK
	-MRI	3	3	3,26
	-IEPK	2	2,96	2,78

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan Badan Litbang Perhubungan telah memenuhi target tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Litbang Perhubungan yaitu pada level 3 (terdefinisi), sehingga diperoleh capaian kinerja untuk IKK 8 adalah sebesar 100%.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2021 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan

Pencapaian sasaran strategis ketiga diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 25 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2021	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	82	100	121,95

IKK 9 : Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan

Perkembangan tantangan dan kendala yang dihadapi sektor transportasi akhir-akhir ini semakin besar ditambah dengan adanya tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, Badan Litbang Perhubungan sebagai institusi penelitian dituntut mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat dengan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mudah diaplikasikan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sama penelitian dengan pihak lain ditunjang dengan sumber daya yang ada, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dalam hal ini selaku koordinator kegiatan kerjasama bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan administrasi kerjasama dan memantau pelaksanaan kerjasama penelitian di lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Kolaborasi Badan Litbang Perhubungan dengan 11 Perguruan Tinggi dan 2 Lembaga pada tahun 2021 menghasilkan 38 penelitian dengan rincian mitra kerja sama dan judul penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. 26 Daftar Mitra Kerja Sama dan Judul Penelitian
Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021**

NO.	MITRA KERJA SAMA	JUDUL PENELITIAN
1.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Potensi Pengoperasian Floating Storage Barge sebagai Infrastruktur Penunjang Wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan.
2.	Litbang Kompas	Perumusan Bahan Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2021
3.	Universitas Indonesia	a. Integrasi Jaringan Prasarana Transportasi Dalam Rangka Pengembangan Stasiun Manggarai sebagai Central Station b. Integrasi Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP) Kawasan Timur Indonesia c. Evaluasi Standar Kompetensi SDM pada Bidang Jalan dan Perkeretaapian Berbasis Perkembangan Teknologi d. Kaji Ulang UU 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Terhadap Skema Penyelenggaraan, Kelembagaan, dan Teknologi e. Pengaturan Pengoperasian UAF/Drone di Kawasan Perkotaan f. Peningkatan Fasilitas Keamanan dan Kesehatan Penerbangan di Bandar Udara g. Strategi Penguatan Kelembagaan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Penerbangan
4.	Institut Teknologi Bandung	a. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemulihan Sektor Angkutan Logistik Selama Masa dan Pasca PSBB b. Kesiapan Perusahaan Pelayaran dan Perusahaan Keagenan Kapal di Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 c. Evaluasi Sistem Persinyalan Perkeretaapian Yang Mengintegrasikan Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian d. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Angkutan Muatan Barang dan Penumpang e. Penyusunan Kajian Implementasi Dan Standar Serta Kriteria Sarana Angkutan Umum Autonomous Berbasis Energi Listrik di Wilayah IKN f. Perumusan Bahan Kebijakan Mekanisme Buy The Service

NO.	MITRA KERJA SAMA	JUDUL PENELITIAN
		Penyelenggaraan Angkutan Umum g. Dampak Kebijakan dan Strategi Implementasi Penertiban <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL) h. Kaji Ulang Tata Kelola Organisasi Pengelola Terminal Penumpang i. Evaluasi Pengembangan Jaringan dan Rute Penerbangan di Indonesia j. Kebijakan Pemanfaatan dan Pemilihan Sistem Energi Alternatif Sebagai Penunjang Operasi Bandara k. Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara Internasional l. Pengaturan Pemanfaatan <i>Drone</i> Untuk Distribusi Kargo Ke Wilayah Terpencil, Terluar, Tertinggal (3T) dan Wilayah Rawan Bencana
5.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	a. Penyiapan SDM Kapal Untuk Menyongsong Teknologi Industri 4.0 b. Potensi dan optimalisasi <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) dan Traffic Separation Scheme (TSS) terintegrasi di Perairan Indonesia
6.	Universitas Gadjah Mada	a. Integrasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Kawasan Pariwisata b. Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Logistik c. Integrasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Kawasan Ibukota Negara dan Daerah Penyangga d. Mitigasi dan Perumusan Bahan Standar Teknis Sistem Perlindungan Sebidang Perkeretaapian e. Penyusunan Standar Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Kereta Api f. Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem di Sekitar Bandar Udara Untuk Penanggulangan Wildlife g. Pengaturan Pengoperasian Waterbase dan Seaplane di Indonesia h. Pengembangan Aerotropolis di Wilayah Sekitar Ibukota Negara Baru
7.	Universitas Hasanuddin	Realokasi Kapal Penyeberangan Milik GAPASDAP ke Wilayah Lintasan Penyeberangan Indonesia Bagian Timur
8.	Universitas Brawijaya	Penggalian Informasi sebagai Perspektif Penetapan Regulasi Penataan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan
9.	Universitas Nusa Cendana	Studi Evaluasi dan Optimasi Rute Tol Laut (Kebijakan dan Model Pengelolaan)
10.	Universitas Pattimura	Kebijakan Kesiapan Galangan Kapal Dalam Mendukung Sektor Transportasi Laut
11.	Universitas Sriwijaya	Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, dan Layanan Transportasi Perkotaan Palembang

NO.	MITRA KERJA SAMA	JUDUL PENELITIAN
12.	Universitas Mulawarman	Potensi Pengoperasian dan Desain Floating Wharf Barge sebagai Infrastruktur Penunjang Ibukota Negara;
13.	Universitas Diponegoro	Distribusi Logistik Dalam Rangka Mendukung Konektivitas dan Ekonomi Wilayah (Modal Share dan Konektivitas Distribusi Logistik)

Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama}}{\text{Jumlah Total Kerja Sama}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh kerja sama Badan Litbang Perhubungan telah ditindaklanjuti sehingga diperoleh realisasi IKK 9 untuk tahun 2021 yaitu sebesar 100% telah melampaui target di tahun 2021 sebesar 82% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 121,95%.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah komitmen dan konsistensi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara masing-masing pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan ini serta dukungan dan partisipasi aktif dari para pimpinan Badan Litbang Perhubungan.

Perbandingan realisasi indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Balitbanghub Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	80	100	100	87

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2021 sama dengan realisasi tahun 2020 dan sudah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan

Pencapaian sasaran strategis keempat diwujudkan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 28 Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2021	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90	100	111,11
IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70	97,53	139,33

IKK 10 : Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data

Sekretariat Badan Litbang Perhubungan sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Litbang Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan aplikasi dan data sebagai pendukung dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

Pada tahun 2021 Sekretariat Badan Litbang telah melakukan pengembangan dan pembangunan aplikasi yang telah dimanfaatkan baik oleh internal maupun eksternal. Selain aplikasi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan juga telah menyusun data-data penelitian yang juga dapat dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal.

Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data (IKK 10) ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan pengelolaan aplikasi dan data Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2021. Metode perhitungan IKK 10 ini yaitu Jumlah aplikasi yang digunakan dibagi dengan jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dengan bobot 50% dan Jumlah data yang dimanfaatkan dengan bobot 50%. Berikut daftar aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan pada tahun 2021 serta daftar data yang dimiliki oleh Badan Litbang Perhubungan:

Tabel 3. 29 Daftar Aplikasi dan Data Balitbanghub Tahun 2021

APLIKASI/DATA	PEMANFAATAN
APLIKASI	
1. e-Penelitian	<i>database</i> hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan
2. Sigap Sihati	Sarana pengaduan dan permintaan informasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Litbang Perhubungan
3. e-Survey	Sarana pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan Badan Litbang Perhubungan
4. OJS (<i>Open Journal System</i>)	Aplikasi pengelolaan jurnal di Lingkungan Badan Litbang

APLIKASI/DATA	PEMANFAATAN
	Perhubungan
5. e-Library	Aplikasi pengelolaan perpustakaan Lingkungan Badan Litbang Perhubungan
6. <i>Cloud</i> Balitbanghub	Aplikasi penyimpanan data Badan Litbang Perhubungan
7. Aplikasi Lomba Transhub dan sistem penjurian	Aplikasi yang digunakan untuk dalam pelaksanaan Lomba Transhub dan sistem penjurian lomba Transhub
8. Aplikasi Dashboard Pimpinan	Aplikasi yang digunakan pimpinan dalam memantau pelaksanaan kinerja dan anggaran Badan Litbang Perhubungan
9. Website Balitbanghub	Sarana informasi profil Badan Litbang Perhubungan dan juga sarana informasi berta terkini tentang Badan Litbang Perhubungan
10. Semesta	Aplikasi pemantauan pemanfaatan penelitian Badan Litbang Perhubungan yang telah dilaksanakan
11. Monitoring Keuangan	Aplikasi pemantauan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Litbang Perhubungan
DATA	
1. Data Statistik	Data Statistik Badan Litbang Perhubungan akan dijadikan Buku Statistik oleh Kementerian Perhubungan
2. Data Riset dan Teknologi	Data Riset dan Teknologi Badan Litbang Perhubungan akan dijadikan buku oleh Kementerian Riset dan Teknologi
3. Data Gender	Data gender yang terdiri dari komposisi jumlah, pendidikan, jabatan pegawai Badan Litbang Perhubungan berdasarkan Gender telah digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Data e-Survey	Data hasil survey yang dijadikan database untuk pelaksanaan survey selanjutnya yang akan dilaksanakan
5. Data SPBE	Data Badan Litbang Perhubungan yang dimanfaatkan untuk keperluan audit internal

Berdasarkan tabel daftar aplikasi dan data Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 di atas terdapat 11 aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan pada tahun 2021, dari sebelas aplikasi tersebut pada tahun 2021 seluruh aplikasi tersebut telah dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal. Begitu juga dengan lima data yang dimiliki telah dimanfaatkan oleh pihak eksternal Badan Litbang Perhubungan. Target tahun 2021 untuk indikator ini adalah 90% dan telah terealisasi pada tahun 2021 sebesar 100% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini diperoleh sebesar 111,11%. Faktor keberhasilan dari indikator ini adalah ketersediaan anggaran dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dari para penanggung jawabnya serta adanya koordinasi pembagian tugas serta manajemen yang baik sehingga dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90	100	100	93

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2021 sama dengan realisasi tahun 2020 dan sudah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

IKK 11 : Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi

Merupakan perhitungan kinerja berdasarkan penelitian yang dipublikasikan baik berupa publikasi dengan media, jurnal maupun kanal publikasi lainnya. Perhitungan realisasi untuk indikator ini menggunakan bobot dari setiap jenis publikasi yang telah dilakukan. Sekretariat Badan Litbang Perhubungan merupakan penanggung jawab jurnal publikasi Warta Penelitian dan juga sebagai koordinator pengelolaan jurnal di lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Badan Litbang Perhubungan saat ini memiliki 5 (lima) jurnal transportasi yaitu Warta Penelitian, Jurnal Transportasi Multimoda, Jurnal Transportasi Darat, Jurnal Transportasi Laut, dan Warta Ardhia yang dikelola oleh masing-masing Unit Eselon II di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan.

Suatu jurnal dikatakan berkualitas apabila memperoleh akreditasi dari LIPI selaku pembina lembaga penelitian di Indonesia, karenanya publikasi penelitian melalui jurnal terakreditasi menjadi salah satu target capaian. Jurnal Badan Litbang Perhubungan telah terakreditasi SINTA dari Kemenristek dengan peringkat akreditasi SINTA 2 untuk Warta Penelitian, Jurnal Transportasi Multimoda, Jurnal Transportasi Darat, dan Warta Ardhia sedangkan Jurnal Transportasi Laut telah terakreditasi SINTA 4.

Selain melalui jurnal terakreditasi hasil penelitian juga dapat dipublikasikan melalui media sosial, media cetak maupun *online*, *website*, dan penerbitan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sekretariat Badan Litbang Perhubungan selain sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan jurnal juga berperan sebagai koordinator yang bertugas menghimpun, mengevaluasi kelayakan naskah dan memroses pengajuan HKI kepada Kemenkum HAM dan juga penanggung jawab dalam publikasi melalui media sosial, media cetak maupun *online*, dan melalui *website* Badan Litbang Perhubungan.

Perhitungan untuk indikator ini menggunakan sistem bobot yang diberikan pada masing-masing jenis publikasi penelitian, yaitu :

- a. Jurnal terakreditasi dengan bobot 25%;

- b. Media Cetak dan *Online* dengan bobot 20%;
- c. Sertifikat HKI dengan bobot 17,5%;
- d. Webinar dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan bobot 17,5%;
- e. *Website* Balitbanghub dengan bobot 10%; dan
- f. Media Sosial dengan bobot 50%.

Berdasarkan skor pembobotan tersebut telah dilakukan perhitungan untuk realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi, yaitu:

Tabel 3. 31 Skor Pembobotan Tingkat Publikasi

NO	PUBLIKASI/DISEMINASI	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SKOR AKHIR
1	Jurnal terakreditasi	25%	24	21	87,50%	21,88%
2	Media cetak dan online (artikel)	20%	25	16	64,00%	12,80%
3	HKI	18%	50	46	92,00%	16,10%
4	Webinar/FGD	18%	30	27	90,00%	15,75%
5	Website	10%	60	68	113,33%	11,33%
6	Medsos	10%	30	59	196,67%	19,67%
		100%	TOTAL SKOR			97,53%

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 11 yaitu sebesar 97,53% telah melampaui target pada tahun 2021 yaitu sebesar 70%. Capaian kinerja untuk indikator ini diperoleh sebesar 139,32%. Keberhasilan pada indikator ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan yang memenuhi syarat memperoleh sertifikat HKI dikarenakan adanya komitmen dari Para Peneliti yang menghasilkan penelitian yang berkualitas dan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya melindungi hak cipta hasil penelitiannya dan juga komitmen tinggi untuk menghasilkan penelitian dengan rekomendasi yang berkualitas dan mendukung kemajuan transportasi nasional serta komitmen dan konsistensi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

Namun berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa media publikasi/diseminasi yang belum mencapai target di tahun 2021, hal ini disebabkan terlambatnya proses penerbitan Jurnal Transportasi Laut yang sampai saat laporan ini disusun masih dalam tahap *review* oleh Mitra Bestari, selain itu juga dikarenakan adanya *refocusing* anggaran sehingga terdapat beberapa penelitian yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target di tahun 2021.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi Tahun 2021 dengan target 2021, realisasi tahun 2020, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

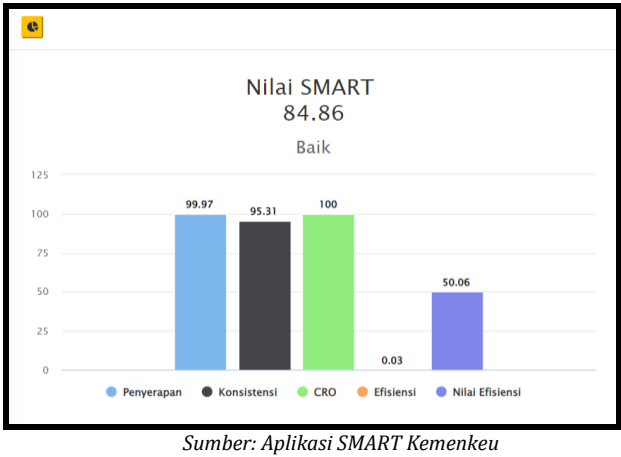
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024
IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70	97,53	99,83	75

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2021 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan sudah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

III.2.2. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dari segi anggaran, berdasarkan penilaian kinerja dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) milik Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan efisiensi anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan untuk tahun 2021 adalah sebesar 0,03% dengan nilai kinerja 84,86%. Secara rinci penilaian kinerja pada aplikasi SMART dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Gambar 3. 4 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2021 telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK 02/ 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada peraturan terbaru mengatur tata cara pengukuran pada proses evaluasi kinerja, yang terdiri 5 (lima) indikator, dengan pengelompokan kategori Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk dalam kategori Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk dalam kategori Cukup;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk dalam kategori Kurang; dan
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

Rincian perhitungan nilai kinerja anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan, adalah sebagai berikut:

1. Capaian Rincian Output (RO) Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : realisasi volume RO i

TVRO_i : target volume RO i

m : jumlah RO

**Tabel 3. 33 Target dan Realisasi Capaian Rincian Output
Setbadan Litbang Perhubungan Tahun 2021**

NO.	RINCIAN OUTPUT	VOLUME		(RVRO / TVRO) x 100%	CAPAIAN RO PER SATKER
		Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
1.	Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara	1	1	100%	100%
2.	Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan	1	1	100%	
3.	Layanan administrasi dan pengembangan SDM	1	1	100%	
4.	Kebijakan Tata Kelola Internal	1	1	100%	
5.	Layanan Administrasi Rencana, Program dan Evaluasi Riset Kebijakan	1	1	100%	
6.	Layanan Administrasi, Keuangan, Barang Milik Negara, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan Riset Kebijakan	1	1	100%	
7.	Administrasi Perkantoran Kesekretariatan	1	1	100%	
8.	Administrasi Sarana Internal	1	1	100%	
9.	Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu-Isu Strategis	1	1	100%	
10.	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	1	1	100%	

NO.	RINCIAN OUTPUT	VOLUME		(RVRO / TVRO) x 100%	CAPAIAN RO PER SATKER
		Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
11.	Layanan Publikasi, Kepustakaan dan Kehumasan	1	1	100%	

$$CRO = \left(\left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \right)^{\frac{1}{11}} \times 100\%$$

$$CRO = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas capaian RO Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 adalah sebesar 100%.

2. Penyerapan Anggaran

Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2021 didapatkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

Tabel 3. 34 Tingkat Penyerapan Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 per Bulan

NO	BULAN	RPD (Rp.,-)	REALISASI ANGGARAN (Rp.,-)	TINGKAT PENYERAPAN
1	Januari	882.820.991	914.266.934	103,56%
2	Februari	2.079.332.988	2.232.998.036	107,39%
3	Maret	4.233.879.993	4.489.860.843	106,05%
4	April	2.944.422.995	3.139.328.996	106,62%
5	Mei	6.858.687.997	7.262.457.913	105,89%
6	Juni	3.562.854.990	3.790.709.203	106,40%
7	Juli	4.946.909.996	5.219.632.208	105,51%
8	Agustus	4.178.444.007	4.107.168.413	98,29%
9	September	5.583.310.996	5.878.267.969	105,28%
10	Oktober	3.288.914.994	2.962.708.499	90,08%
11	November	3.535.382.994	2.939.220.362	83,14%
12	Desember	3.748.254.059	2.894.971.890	77,24%
TOTAL		45.843.217.000	45.831.591.266	99,97%

*Sumber: Aplikasi SMART (<http://smart.kemenkeu.go.id>)

$$P = \frac{45.831.591.266}{45.843.217.000} \times 100\%$$

$$P = 99,97\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,97%.

3. Analisis Efisiensi Tingkat Satuan Kinerja

Formula penghitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Tabel 3. 35 Perhitungan Skalia Efisiensi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021

NO.	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	CRO PER KRO (%)	ALOKASI ANGGARAN (AAKRO)	REALISASI ANGGARAN (RAKRO)	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (3)	(7) = (6) - (5)
1	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100	693.082.000	692.980.603	693.082.000	101.397
2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100	3.460.271.000	3.475.707.002	3.460.271.000	2.563.998
3	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	100	1.498.385.000	1.498.206.230	1.498.385.000	178.770
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	100	9.583.965.000	9.581.085.667	9.583.965.000	2.879.333
5	Layanan Perkantoran	100	21.414.424.000	21.409.975.781	21.414.424.000	4.448.219
6	Layanan Sarana Internal	100	6.385.826.000	6.384.433.611	6.385.826.000	1.392.389
7	Kerja Sama	100	549.096.000	549.066.421	549.096.000	29.579
8	Layanan Data dan Informasi	100	2.258.168.000	2.258.135.951	2.258.168.000	32.049
JUMLAH			45.843.217.000	45.831.591.266	45.843.217.000	11.625.734
Efisiensi RO Satker = $\frac{\Sigma(7)}{\Sigma(4)} \times 100\%$					0,03%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Persentase Efisiensi Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,03%. Untuk mendapatkan

Nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian *output*, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu 0% s.d. 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0% s.d. 100%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% s.d. 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:
NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,03}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50,06\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Nilai Efisiensi Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sebesar 50,06%.

4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:
K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
RAK_n : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n
RPDK_n : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
n : jumlah bulan

Tabel 3. 36 Rencana Penarikan Dana Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 per Bulan

NO	BULAN	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KUMULATIF
1	Januari	882.820.991	882.820.991	914.266.934	914.266.934
2	Februari	2.079.332.988	2.962.153.979	2.232.998.036	3.147.264.970
3	Maret	4.233.879.993	7.196.033.972	4.489.860.843	7.637.125.813
4	April	2.944.422.995	10.140.456.967	3.139.328.996	10.776.454.809
5	Mei	6.858.687.997	16.999.144.964	7.262.457.913	18.038.912.722
6	Juni	3.562.854.990	20.561.999.954	3.790.709.203	21.829.621.925
7	Juli	4.946.909.996	25.508.909.950	5.219.632.208	27.049.254.133
8	Agustus	4.178.444.007	29.687.353.957	4.107.168.413	31.156.422.546

NO	BULAN	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KUMULATIF
9	September	5.583.310.996	35.270.664.953	5.878.267.969	37.034.690.515
10	Oktober	3.288.914.994	38.559.579.947	2.962.708.499	39.997.399.014
11	November	3.535.382.994	42.094.962.941	2.939.220.362	42.936.619.376
12	Desember	3.748.254.059	45.843.217.000	2.894.971.890	45.831.591.266

*Sumber: Aplikasi SMART (<http://smart.kemenkeu.go.id>)

Dari tabel di atas sebagai contoh pada Bulan Januari diperoleh nilai konsistensi adalah sebagai berikut:

$$K (\text{Januari}) = \left(\frac{882.820.991 - (882.820.991 - 914.266.934)}{882.820.991} \right) \times 100\%$$

$$K (\text{Januari}) = 96,44\%$$

Dengan cara yang sama, diperoleh nilai konsistensi untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 37 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran per Bulan Tahun 2021

NO	BULAN	TINGKAT KONSISTENSI PER BULAN
(1)	(2)	(3)
1	Januari	96,44%
2	Februari	93,75%
3	Maret	93,87%
4	April	93,73%
5	Mei	93,88%
6	Juni	93,84%
7	Juli	93,96%
8	Agustus	95,05%
9	September	95,00%
10	Oktober	96,27%
11	November	98,00%
12	Desember	99,97%
<i>Konsistensi Penyerapan = $\frac{\Sigma(3)}{12}$</i>		95,31%

Sumber: Hasil Analisis 2021

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sebesar 95,31%.

5. Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja sama dengan cara perhitungan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja dengan rumus sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian *Output* Program

CRO : capaian RO

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian *Output* Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

W_E : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

$$W_P = 9,7\%$$

$$W_K = 18,2\%$$

$$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5\%$$

$$W_E = 28,6\%$$

Tabel 3. 38 Nilai Variabel Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021

PENYERAPAN ANGGARAN (P)	KONSITENSI PENYERAPAN (K)	CAPAIAN RO (CRO)	NILAI EFISIENSI (NE)
99,97 %	95,31%	100%	50,06%

$$NKA = (99,97 \times 9,7\%) + (95,31 \times 18,2\%) + (100 \times 43,5\%) + (50,06 \times 28,6\%)$$

$$NKA = 84,86\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sebesar 84,86%

III.2.3. CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

Sebagai unit kerja pendukung kegiatan utama Badan Litbang Perhubungan, sepanjang tahun 2021 Sekretariat Badan Litbang Perhubungan senantiasa berusaha memberikan dukungan layanan manajemen dan manajemen teknis lainnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Beberapa capaian keberhasilan lainnya serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan di Tahun 2021 antara lain:

1. Dalam rangka mensosialisasikan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia, peluang dan tantangan serta isu-isu teknis terkait pemanfaatan SWF dalam percepatan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan webinar dengan tema “Potensi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi di Indonesia” pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 melalui media virtual aplikasi *Zoom Meeting*.



Gambar 3. 6 Sambutan sekaligus *Keynote Speech* Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi



Gambar 3. 5 *Keynote Speech* Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati



Gambar 3. 7 Pembicara Deputy Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ibu Nawal Nely

Beberapa hasil rumusan dari penyelenggaraan webinar ini adalah sebagai berikut

- a. Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) merupakan Badan Hukum Indonesia milik Pemerintah Indonesia yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai PP Nomor 74 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- b. LPI atau INA memiliki mandat mengelola investasi dan bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi investasi. Adapun tujuan pembentukan LPI adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Dengan harapan pembiayaan infrastruktur kedepannya tidak hanya sekedar mengandalkan uang murni, APBN dan pinjaman;
- c. LPI dibentuk sebagai langkah antisipatif terhadap terbatasnya kapasitas investasi dalam negeri, jumlah hutang negara yang terus bertambah, kebutuhan kepastian hukum kepada para investor asing terlebih lagi dengan kondisi saat ini, dikarenakan dampak dari COVID-19 pembangunan infrastruktur di sektor transportasi menjadi cenderung tertunda;
- d. Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian dan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Selama ini Kementerian Perhubungan telah menggunakan mekanisme pendanaan melalui blend fund investment, namun masih belum optimal untuk menyokong kebutuhan pendanaan pembangunan proyek strategis yang sangat besar;
- e. Sumber pendanaan alternative selain mengandalkan APBN dan pinjaman sangat diperlukan. LPI dalam hal ini memberikan alternative pembiayaan investasi bukan dalam bentuk pinjaman atau hutang tapi dalam bentuk ekuitas, yaitu sebagai bisnis partner antara investor dan INA dalam rangka pembiayaan infrastruktur;
- f. LPI atau INA hadir melengkapi skema pembiayaan infrastruktur dan diharapkan mengakselerasi kondisi investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di masa pandemi, karenanya kebutuhan regulasi pendukung sangat diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan proyek strategis;
- g. Untuk itu dalam prakteknya LPI perlu memperhatikan tantangan serta potensi hambatan antara lain memperhatikan isu politik nasional, kondisi nilai tukar dan ekonomi serta kebutuhan dukungan regulasi dan pedoman yang jelas guna mengantisipasi dampak serta kebutuhan transparansi dalam mendapatkan kepercayaan investor.
- h. Prospek pembiayaan investasi infrastruktur sangat tinggi, INA dilihat sebagai financial engineering dan strategi out of the box selain KPBU di samping mekanisme pembiayaan infrastruktur lainnya yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
- i. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan melalui direktorat teknis akan menindaklanjuti melalui penyiapan aksi terkait peluang kerjasama dengan INA, yaitu dengan melakukan klastering untuk menentukan prioritas proyek-proyek strategis pembangunan infrastruktur di sektor transportasi.
- j. Salah satu value pembentukan INA adalah excellent dimana dalam unsur ini ada prinsip kehati-hatian. Dengan dukungan para profesional pada jajaran dewan direktur dan dewan pengawas diharapkan dapat memberikan keseimbangan kebijakan dalam pengelolaan anggaran negara dan investasi sekaligus mendapatkan kepercayaan dari investor asing.
- k. Melalui LPI juga diharapkan dengan masuknya investasi memberikan dampak positif sosial melalui penyediaan lapangan kerja.

2. Dalam rangka meningkatkan etika dan profesionalisme kerja pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan seminar pengembangan kompetensi pegawai dengan tema **“Etika dan Profesionalisme Kerja”** pada hari Selasa dan Rabu tanggal 8 dan 9 Juni 2021 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran – Jakarta Pusat serta melalui media virtual aplikasi *Zoom Meeting*.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sosial kultural pegawai Badan Litbang Perhubungan dan memberikan pemahaman terkait pentingnya etika dan penegakkan disiplin di lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Peserta kegiatan ini adalah seluruh pegawai Badan Litbang Perhubungan yang dibagi dalam dua sesi yaitu sesi pertama tanggal 8 Juni 2021 dihadiri oleh para CPNS di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dengan metode tatap muka dan sesi kedua tanggal 9 Juni 2021 dihadiri oleh PNS dan PPNPN di lingkungan Badan Litbang Perhubungan melalui media virtual. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Sandra Erawanto, S.TP., M.Pub.Pol. pakar etika pergaulan internasional dan pengembangan kepribadian yang juga merangkap sebagai Widyaiswara Muda Kementerian Sekretariat Negara.



Gambar 3. 8 Sambutan Pembukaan Seminar oleh Plt. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Setbadan Litbang Perhubungan



Gambar 3. 9 Pemaparan Materi oleh Narasumber Bapak Sandra Erawanto, S.TP., M.Pub.Pol.



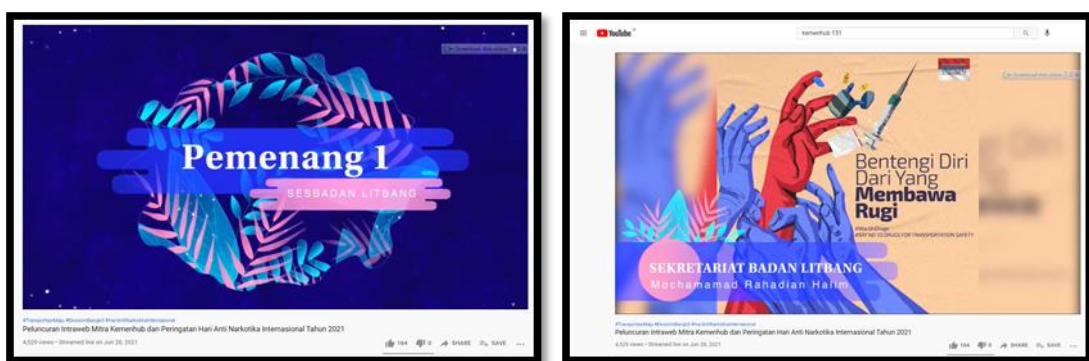
Gambar 3. 10 Foto Bersama Narasumber dan Peserta Seminar Etika dan Profesionalisme Kerja – Selasa, 8 Juni 2021

3. Dalam rangka Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan mengadakan Perlombaan Konten Visual Grafis HANI 2021 di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan tema **“Perang Melawan Narkoba (*War On Drugs*) di Era Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Bersih Narkoba (*Bersinar*)”** yang diselenggarakan tanggal 8 s.d. 18 Juni 2021 dan diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sekretariat Badan Litbang Perhubungan ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba tersebut dengan mengirimkan hasil kreasi konten visual grafis dan berhasil menjadi **Pemenang Terbaik Pertama**. Hadiah 3 Besar dan Juara Harapan 1 Lomba Konten Visual Grafis HANI 2021 di lingkungan Kementerian Perhubungan berupa Trofi + Sertifikat + Sehari Bersama Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan meninjau langsung aksi perang melawan narkoba di daerah destinasi wisata.



Gambar 3. 11 Desain Konten *Visual Grafis* oleh Mohammad Rahadian Halim Perwakilan Peserta Sekretariat Badan Litbang Perhubungan



Gambar 3. 12 Pengumuman Pemenang dalam Kegiatan Peluncuran Mitraweb Kementerian Perhubungan dan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2021 – Senin, 28 Juni 2021

4. Dalam rangka melihat kembali relevansi peraturan perundang-undangan transportasi yang ada pada saat ini dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia supaya

berhasil dan berdaya guna, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema: **“Meneropong Undang-Undang Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Saat Ini”** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 melalui media virtual aplikasi *Zoom Meeting*.



Gambar 3. 13 Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Meneropong Undang-Undang Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Saat Ini

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perhubungan serta *stakeholder* terkait, beberapa butir kesimpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Peserta FGD berpendapat bahwa UU tentang Sistem Transportasi adalah suatu keniscayaan. Hal ini disebabkan 4 (empat) UU di Bidang Transportasi tidak menunjukkan kesatuan transportasi sebagai suatu sistem. Sebagai akibatnya perwujudan an Interated Transport System secara operasional kurang didukung aturan yang ada, apalagi pipa yang juga merupakan moda transport hingga saat ini belum ada pengaturannya.
- b. UU sistem transportasi yang diinginkan haruslah merupakan:
 - 1) UU yang visioner, *futuristic*, pandangan ke depan, dan berdaya laku lama;
 - 2) Sebagai suatu sistem, transportasi terdiri dari Sub Sistem yaitu Prasarana, Sarana, Manusia, dan Peraturan. Kesemua Sub Sistem ini perlu mendapatkan Pengaturan yang terstruktur dengan baik.
 - 3) Jaringan transportasi yang ada di semua moda harus memungkinkan lancarnya konektivitas.
 - 4) Sarana transportasi haruslah memenuhi persyaratan kelaikan yang memungkinkan dioperasikan dengan selamat, tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan kebisingan.
 - 5) Manusia sebagai pengendali dan para pembantunya dalam bertarnsportasi haruslah mempunyai kompetensi yang sesuai.

- 6) Norma dan kebijakan yang dibuat, di samping untuk ketertiban, keamanan, dan keselamatan harus pula memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat. UU tidak hanya dibuat top-down saja tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Saat ini masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam penyusunan keempat UU transportasi.
 - 7) Mengintegrasikan semua moda transport yang ada termasuk pipa.
 - 8) Harus bisa menghapus/menghilangkan, atau tidak lagi memuat semua aturan/norma yang selama ini merugikan eksistensi Kementerian Perhubungan. Melalui UU Sistranas nanti diharapkan dapat menarik kembali kewenangan yang selama ini diambil alih oleh instansi lain melalui UU yang ada.
 - 9) Menjaga harmoni dengan semua per-UU-an yang berkaitan dengan transportasi, antara lain KUHP, KUHP, KUH Perdata, UU Pemerintahan Daerah, UU Jalan, UU Cipta Kerja, dan lain lain. Ada keharmonisan antara UU Sistranas dengan UU yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan UU Sistranas mencabut aturan yang telah ditetapkan dalam UU sebelumnya.
 - 10) Mampu mewujudkan transportasi yang kapasitasnya *sufficient and least cost*, sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - 11) Sudah meng-absorb *Digital Transformation*, sehingga UU ini memberi arah kepada semua stakeholdernya untuk bekerja dengan efisien, innovative, cerdas, dan memperhatikan pengalaman dan kebutuhan masyarakat.
 - 12) Untuk itu dalam perumusan UU-nya perlu didengar komunitas masyarakat yang berkaitan transportasi, antara lain Organda, ALVI, *Freight Forwarder*, dsb
 - 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) perlu ditingkatkan menjadi UU dengan beberapa perbaikan sesuai dengan kondisi transportasi saat ini.
- c. Tentang Penggantian atau Revisi UU yang sudah ada, mungkin tidak perlu mengganti UU tetapi mencabut pasal-pasal yang tidak tepat.
 - d. Bila UU yang akan disusun sudah memenuhi hal-hal tersebut di atas, maka peranan transportasi sebagai Promoting dan Servicing Function dalam Ekonomi Makro dan Management Function secara operasional akan tercapai.
 - e. FGD merekomendasikan agar badan Litbang Perhubungan bekerja sama dengan Biro Hukum:
 - 1) Melapor dan mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk pembuatan RUU SISTEM TRANSPORTASI, tidak lagi menggunakan nasional karena UU sifatnya sudah nasional. Transportasi memiliki 3 (tiga) tatanan, yaitu nasional, wilayah/provinsi dan local/kabupaten/kota. Setiap wilayah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyusun sistem transportasi dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.
 - 2) Menyelenggarakan FGD tahap kedua, ketiga dan seterusnya untuk pembahasan lebih lanjut serta membentuk tim penyusun RUU Sistem Transportasi.

5. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta IV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-2968/ WPB.12/ KP.04/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Penghargaan Indikator Kinerja Penilaian Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2021, KPPN Tipe A1 Jakarta IV memberikan penghargaan kepada Tiga Satuan Kerja dengan nilai IKPA terbaik yang dibagi ke dalam empat kategori, yaitu: (1) Pagu Jumbo (100 Milyar ke atas); (2) Pagu Besar (30 s.d. 100 Milyar); (3) Pagu Sedang (5 s.d. 30 Milyar); dan (4) Pagu Kecil (Kurang dari 5 Milyar). Sekretariat badan Litbang Perhubungan memperoleh Peringkat Kedua Kategori Pagu Besar dengan nilai IKPA 96,40. Sebagai bentuk apresiasi, KPPN Tipe A1 Jakarta IV memberikan penghargaan berupa Sertifikat dengan harapan setiap Satuan Kerja dapat meningkatkan performanya untuk penilaian IKPA.



Gambar 3. 14 Piagam Penghargaan Nilai IKPA Terbaik Peringkat Kedua

6. Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan yang dikelola oleh Sekretariat Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2021 telah terakreditasi A yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional berdasarkan surat Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional nomor 6145/4.1/PPM.02/XII.2021 tanggal 9 Desember 2021. Akreditasi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).



Gambar 3. 15 Sertifikat Akreditasi "A" Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan

7. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance dan untuk memberikan apresiasi atas kepatuhan unit kerja dalam mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan terhadap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berpartisipasi aktif dalam pengisian data kinerja melalui aplikasi e-performance Sekretariat Badan Litbang Perhubungan masuk ke dalam peringkat 25 besar tingkat Eselon II dalam pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2021.



Gambar 3. 16 Daftar Peringkat 25 Besar Unit Kerja Terbaik dalam Partisipasi Aktif Pengisian Data Kinerja melalui Aplikasi e-performance

III.3. REALISASI ANGGARAN

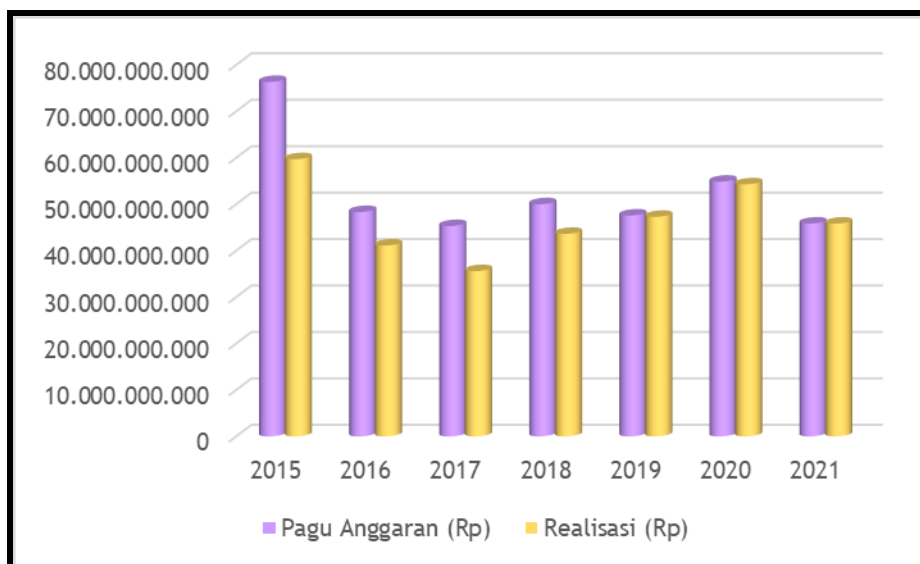
Perkembangan pagu anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan selama rentang waktu tahun 2015-2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3. 39 Perkembangan Anggaran Tahun 2015-2021 Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
2015*	76.347.530.000	59.703.543.144	78,20
2016**	48.320.175.000	41.107.864.161	85,07
2017	45.298.345.000	35.588.942.492	78,57
2018	50.003.832.000	43.620.371.419	87,23
2019	47.569.996.000	47.281.079.874	99,39
2020	54,858,322,000	54,286,203,925	98,96
2021	45.843.217.000	45.831.591.266	99,97

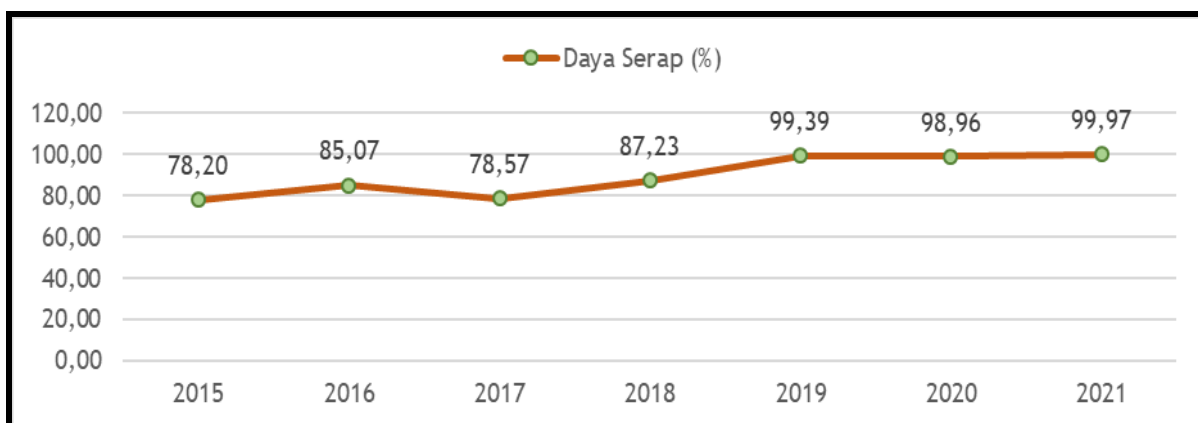
*) Catatan: Setelah dilakukan penghematan

**) Setelah dilakukan penghematan dan self-blocking



Gambar 3. 17 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2015 – 2021

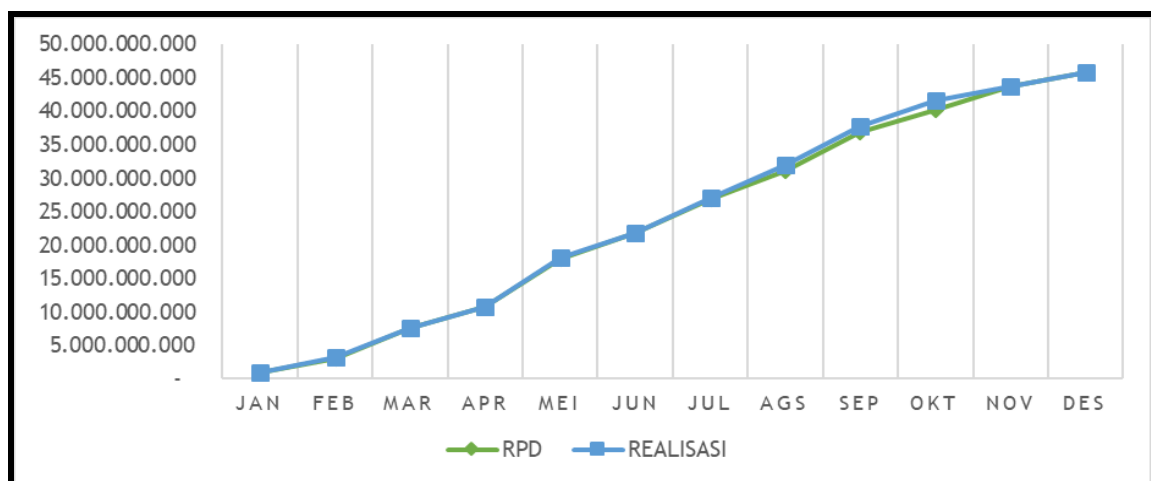
Selama kurun waktu enam tahun pagu anggaran tertinggi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar Rp 76.347.530.000,-. Namun realisasi anggaran hanya sebesar Rp 59.703.543.144,- atau 78,20% dari total rencana anggaran (DIPA). Realisasi tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp 45.831.591.266 atau 99,97% dari total pagu Rp 45.843.217.000,-. Secara rinci perkembangan daya serap Sekretariat Badan Litbang Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 3.11. di bawah ini:



Gambar 3. 18 Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2015-2021

Penyerapan anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 lebih optimal apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh komitmen dan konsistensi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara masing-masing pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2021 berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp. 58.184.697.000,-. Pada bulan Februari dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2021 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp. 9.324.987.000,- sehingga anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 48.859.710.000,-. Pada bulan Juli sesuai surat DJA Nomor: S-550/ AG/ AG.3/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 terdapat refocusing anggaran sehingga anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 kembali mengalami revisi yaitu menjadi Rp. 45.843.217.000,-. Berikut gambar grafik perbandingan rencana penarikan dana revisi akhir dengan realisasi keuangan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021:



Gambar 3. 19 Kurva S - Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Setbadan Litbang

III.3.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2021

Pada tahun 2021 perolehan pagu anggaran revisi Sekretariat Badan Litbang Perhubungan adalah sebesar Rp 45.843.217.000,- dan direncanakan target daya serap sebesar 92% dengan realisasi daya serap anggaran Setbadan Litbang Perhubungan sebesar 99,97%. Kondisi pagu anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.18. di bawah ini:

Tabel 3. 40 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp,-)
Belanja Pegawai	8.951.793.000
Belanja Barang	30.309.980.000
Belanja Modal	6.581.444.000
Total	45.843.217.000

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, 2021

III.3.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap Tahun 2021

Capaian daya serap anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 tercatat sebesar 99,97% atau Rp 45.831.591.266,- dan sisa anggaran yang tidak terserap dari pagu akhir adalah sebesar Rp 11.625.734,- (0,03%). Realisasi daya serap Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 per-jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 41 Capaian Daya Serap Kegiatan Tahun 2020

JENIS BELANJA	PAGU (Rp,-)	REALISASI (Rp,-)	PENYERAPAN
Belanja Pegawai	8.951.793.000	8.947.394.930	99,95%
Belanja Barang	30.309.980.000	30.304.145.545	99,98%
Belanja Modal	6.581.444.000	6.580.050.791	99,98%
Total	45.843.217.000	45.831.591.266	99,97%

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, 2021

Secara lengkap perkembangan pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan termasuk realisasi dan penyerapannya berdasarkan output kegiatan disajikan dalam Matriks Laporan Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 pada **Lampiran II**.

III.3.3. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Tahun 2021

Anggaran Sekretariat Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2021 dalam mendukung ketercapaian IKK Sekretariat Badan Litbang Perhubungan, secara rinci dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3. 42 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN			
	PAGU (Rp,-)	REALISASI (Rp,-)	SISA (Rp,-)	PROSENTASE REALISASI
IKK 1	1.313.617.000	1.313.615.350	1.650	100%
IKK 2	149.946.000	149.944.770	1.230	100%
IKK 3	2.098.663.000	2.098.621.282	41.718	100%
IKK 4	2.835.487.000	2.835.198.811	288.189	99.99%
IKK 5	7.432.965.000	7.431.572.221	1.392.779	99.98%
IKK 6	17.810.093.000	17.800.306.870	9.786.130	99.95%
IKK 7	10.404.562.000	10.404.510.410	51.590	100%
IKK 8	115.820.000	115.820.000	0	100%
IKK 9	549.096.000	549.066.421	29.579	99.99%
IKK 10	1.099.851.000	1.099.848.690	2.310	100%
IKK 11	2.033.117.000	2.033.086.441	30.559	100%

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Eselon II Sekretariat Badan Litbang Perhubungan kepada Badan Litbang Perhubungan atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Litbang Perhubungan dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan. Secara umum pencapaian kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Seluruh indikator kinerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan telah melampaui target sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi II Tahun 2021. Pencapaian rata-rata Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 untuk 11 indikator kinerja kegiatan, yaitu sebesar 113,78%.

IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan nilai laporan kinerja agar memenuhi kriteria (Nilai A) Sekretariat Badan Litbang Perhubungan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melakukan *cascading* indikator kinerja kegiatan dari tingkat Eselon II sampai dengan tingkat pelaksana;
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja kegiatan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan yang pada dasarnya penilaian indikator hanya berada di tingkat level Kementerian/Lembaga seperti Indikator Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN, dan juga indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Perlu ditambahkan Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga indikator dalam mengukur kinerja dari pelayanan perpustakaan;
4. Di setiap persiapan pelaksanaan kegiatan para penanggung jawab kegiatan perlu melakukan perencanaan penyusunan target kegiatan dan anggaran yang lebih baik dan mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan kebijakan apabila terjadi kebutuhan revisi DIPA yang akan mempengaruhi capaian dan kualitas kinerja program;

L A M P I R A N

Lampiran 1

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2021				CAPAIAN KINERJA
							TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 1	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	78,5	80,52	80,52	80,52	80,52	103,23%
			IKK 2	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	72	-	-	-	82,60*	114,72%
			IKK 3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Nilai	0,9	-	-	-	0,93	103,33%
		Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 4	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	80	100	100	100	100	125%
			IKK 5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan	Nilai	65	-	-	-	76,25	117,31
			IKK 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Nilai	84,2	-	-	71,07	87,85	104,33%
			IKK 7	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	71	-	-	-	78,92	111,14%
			IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	-	-	-	3	100

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2021				CAPAIAN KINERJA
							TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
		Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 9	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	%	82	73,68	65	65	100	121,95%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 10	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%	90	29,17	55	68,89	100	111,11%
			IKK 11	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	%	70	14,58	55,24	65,82	97,53	139,33%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA											113,78%

Keterangan* : Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri

Lampiran 2

**Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Sekretariat Badan Litbang Perhubungan
Per Triwulan Tahun Anggaran 2021**

NO	UNIT KERJA	JENIS BELANJA									TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI			BARANG			MODAL					
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)			
TRIWULAN I (PERIODE: JANUARI S/D MARET) TAHUN 2021													
1	Setbadan Litbang Perhubungan	7.837.775.000	1.760.679.818	22,46	33.004.030.000	6.525.737.325	19,77	8.017.905.000	68.343.000	0,85	48.859.710.000	8.354.760.143	17,10
TRIWULAN II (PERIODE: APRIL S/D JUNI) TAHUN 2021													
1	Setbadan Litbang Perhubungan	7.837.775.000	4.902.891.923	62,55	33.004.030.000	16.181.921.993	49,03	8.017.905.000	3.274.370.869	40,84	48.859.710.000	24.359.184.785	49,86
TRIWULAN III (PERIODE: JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN 2021													
1	Setbadan Litbang Perhubungan	9.048.915.000	7.096.344.869	78,42	30.212.858.000	24.220.712.636	80,17	6.581.444.000	6.398.530.791	97,22	45.843.217.000	37.715.588.296	82,27
TRIWULAN IV (PERIODE: OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN 2021													
1	Setbadan Litbang Perhubungan	8.951.793.000	8.947.394.930	99,95	30.309.980.000	30.304.145.545	99,98	6.581.444.000	6.580.050.791	99,98	45.843.217.000	45.831.591.266	99,97